

NEGARA, TAFSIR DAN SEKSUALITAS
Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir
al-Qur'an Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama
Republik Indonesia



Oleh:
Akhmad Supriadi, M.S.I
NIM: 1530016046

DISERTASI
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Al-Qur'an dan Hadis

YOGYAKARTA
TAHUN 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Supriadi, M.S.I
NIM : 1530016046
Jenjang : Doktor

Menyatakan bahwa naskah disertasi yang berjudul:

NEGARA, TAFSIR DAN SEKSUALITAS
Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an Tematik
dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia

Bahwa secara keseluruhan disertasi dengan judul di atas adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karva sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Desember 2021

Saya yang menandatangani.



Akhmad Supriadi, M.S.I
NIM: 1530016046

PENGESAHAN

Judul Disertasi : NEGARA, TAFSIR DAN SEKSUALITAS Konstruksi
Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an Tematik
dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia
Ditulis oleh : Akhmad Supriadi
NIM : 1530016046
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

**Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 28 Januari 2022

An. Rektor/
Ketua Sidang.



Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.
NIP.: 19730423 200501 1 006

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2021), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **AKHMAD SUPRIADI** NOMOR INDUK: **1530016046** LAHIR DI **MUARA TEWEH**, TANGGAL **18 JANUARI 1979**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-821.**

YOGYAKARTA, 28 JANUARI 2022

**AN. REKTOR /
KETUA SIDANG,**



Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.
NIP.: 19730423 200501 1 006

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

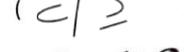
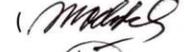


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. & Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Akhmad Supriadi ()
NIM : 1530016046
Judul Disertasi : NEGARA, TAFSIR DAN SEKSUALITAS Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia

Ketua Sidang : Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si. ()
Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D. ()
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag. (Promotor/Penguji) ()
2. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. (Promotor/Penguji) ()
3. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si. (Penguji) ()
4. Prof. Etin Anwar, M.A., Ph.D. (Penguji) ()
5. Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag. (Penguji) ()
6. Ro'fah, S.Ag., M.A., BSW., Ph.D. (Penguji) ()

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.30 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3,83
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,



Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 19741214 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor :

Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag



()

Promotor :

Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.



()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah dilakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

NEGARA, TAFSIR DAN SEKSUALITAS
Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an
Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia

Yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Supriadi, S.H.I, M.S.I
NIM : 1530016046
Program : Doktor
Konsentrasi : Studi Qur'an - Hadis

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 September 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 11 Desember 2021
Promotor,



Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag
NIP. 19520921 198403 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah dilakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

NEGARA, TAFSIR DAN SEKSUALITAS
Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an
Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia

Yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Supriadi, S.H.I, M.S.I
NIM : 1530016046
Program : Doktor
Konsentrasi : Studi Qur'an - Hadis

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 September 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 05 Desember 2021
Promotor,



Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP. 19701024 200112 1 00

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah dilakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

NEGARA, TAFSIR DAN SEKSUALITAS
Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an
Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia

Yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Supriadi, S.H.I, M.S.I
NIM : 1530016046
Program : Doktor
Konsentrasi : Studi Qur'an - Hadis

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 September 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 01 Desember 2021
Penguji,



Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
NIP. 19690120 199703 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah dilakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

NEGARA, TAFSIR DAN SEKSUALITAS
Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an
Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia

Yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Supriadi, S.H.I, M.S.I
NIM : 1530016046
Program : Doktor
Konsentrasi : Studi Qur'an - Hadis

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 September 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr Wb

Geneva , 19 Desember 2021
Penguji,



Prof. Etin Anwar., M.A., Ph.D

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah dilakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

NEGARA, TAFSIR DAN SEKSUALITAS
Konstruksi Maskulinitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an
Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia

Yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Supriadi, S.H.I, M.S.I
NIM : 1530016046
Program : Doktor
Konsentrasi : Studi Qur'an - Hadis

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 September 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 02 Desember 2021
Penguji,



Prof. Dr. Muhiammad, M.Ag
NIP. 19590515 199001 1 002

ABSTRAK

Disertasi ini bertujuan untuk menjelaskan aspek konstruksi maskulinitas dan relasi kuasa yang hadir dalam wacana seksualitas pada *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat kajian kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan gender. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan proses penafsiran yang dilakukan oleh Kementerian Agama secara analitis yang difokuskan pada *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* yang berkaitan dengan wacana seksualitas. Disertasi ini menggunakan dua teori; *pertama*, teori maskulinitas hegemonik (*hegemonic masculinity*) yang digunakan untuk menjelaskan konstruksi maskulinitas dalam wacana seksualitas pada *Tafsir Tematik* dan *Tafsir Ilmi*. Teori *kedua* adalah teori relasi kuasa pengetahuan (*power – knowledge*) sebagai alat untuk menjelaskan bentuk kuasa yang hadir dalam penyusunan dan wacana tafsir Kementerian Agama tersebut. Data primer penelitian diperoleh melalui data kepustakaan, didukung data wawancara dengan para aktor yang terlibat dalam proses penyusunan tafsir. Sedangkan data sekunder adalah kajian sebelumnya terkait Kementerian Agama serta buku dan artikel yang relevan dengan disertasi ini.

Temuan penting yang menjadi kebaruan (*novelty*) disertasi ini adalah pengembangan teori maskulinitas hegemonik yang disebut dengan maskulinitas patriarkis lunak (*mild patriarchic masculinity*) yaitu sebuah model maskulinitas patriarkis yang merepresentasikan hegemoni maskulinitas yang bersifat hierarkis-patriarkis dalam wacana yang dominan pada *Tafsir Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama, namun pada beberapa isu merepresentasikan kesetaraan antara maskulinitas dan femininitas. Model maskulinitas patriarkis lunak (*mild patriarchic masculinity*) merupakan sebuah representasi dari model maskulinitas hegemonik yang terbagi kepada maskulinitas patriarkis aktif (*active patriarchal masculinity*), maskulinitas patriarkis pasif (*passive patriarchal masculinity*), serta maskulinitas setara (*equal masculinity*).

Maskulinitas patriarkis aktif terjadi ketika representasi maskulinitas hegemonik muncul dalam proporsi yang dominan dalam wacana tafsir, sementara porsi wacana femininitas sangat minim. Adapun maskulinitas patriarkis pasif terjadi representasi feminitas disebut atau diuraikan secara luas dalam wacana tafsir, sementara maskulinitas tidak hadir atau hanya muncul dalam proporsi yang sangat minim, namun deskripsi feminitas hanya menonjolkan sisi inferioritas perempuan. Sedangkan maskulinitas setara (*equal masculinity*), yaitu ketika representasi maskulinitas dan feminitas hadir dalam proporsi yang seimbang dalam wacana tafsir, namun porsi keseimbangan dan kesetaraan tersebut tetap dalam perspektif atau cara pandang yang maskulinitas patriarkis.

Dari perspektif relasi kuasa ditemukan bahwa proses penyusunan dan tim penulis Tafsir al-Qur'an Tematik (TAT) dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama didominasi oleh rezim gender laki-laki (maskulin), yang membawa *regime of truth* tersendiri antara lain: hegemoni maskulinitas, ortodoksi Sunni serta rezim heteronormativitas. Relasi kuasa yang bekerja dalam tim Tafsir al-Qur'an Tematik serta Tafsir Ilmi Kementerian Agama adalah kuasa dominasi maskulin yang menyingkirkan penulis tafsir perempuan yang memiliki perspektif gender. Jaringan anggota tim penafsir memiliki titik afiliasi pada enam jaringan utama, yaitu Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta serta jaringan alumni Universitas al-Azhar, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta Universitas Islam Negeri (UIN). Kuasa rezim gender dan jaringan intelektual tersebut kemudian bekerja dalam wacana tafsir untuk melanggengkan ortodoksi ideologi tertentu baik ortodoksi Sunni (dalam pernikahan), ortodoksi maskulinitas hegemonik, afirmasi program pemerintah serta ortodoksi heteronormativitas.

Kata Kunci: Seksualitas, Maskulinitas Hegemonik, Patriarkis, Tafsir al-Qur'an Tematik, Tafsir Ilmi.

ABSTRACT

This dissertation aims at explaining the masculinity construction and power relation aspects which appear in the sexuality discourse in the *Thematic al-Qur'an Interpretation* and *Ilmi Interpretation* of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This qualitative study is a library research with gender approach. An analytical descriptive method that analytically describes the interpretation process by the Ministry of Religion focusing on *Thematic al-Qur'an Interpretation* and *Ilmi Interpretation* concerning sexuality discourse is carried out. Two theories are applied. First, a theory of hegemonic masculinity is used to explain the masculinity construction in a sexuality discourse in the *Thematic Interpretation* and *Ilmi Interpretation*. Second, theory of power-knowledge relation is used to serve as a tool to explain the form of power that appears in the construction and discourse of the interpretation. Primary data were obtained from library data, supported by interviews with people who involved in the interpretation process. Secondary data were taken from earlier studies with regard to the Ministry of religion and some relevant textbooks and articles.

A significant novelty finding is the development of hegemonic masculinity theory called *mild patriarchic masculinity*. This masculinity is a patriarchic masculinity model that represents a hierarchical-patriarchic masculinity hegemony in a dominant discourse in the *Thematic Interpretation* and *Ilmi Interpretation* of the Ministry of Religion, yet, in some issues, the model represents masculinity-femininity equality. Mild patriarchic masculinity model is a representation of hegemonic masculinity model that comprises active patriarchal masculinity, passive patriarchal masculinity, and equal masculinity. Active patriarchal masculinity occurs when hegemonic masculinity's representation predominates the interpretation over femininity discourse. Passive patriarchal masculinity, on the other hand, in spite of female inferiority emphasis, elaborates the high and low of femininity with none or very few of masculinity aspects. Equal

masculinity presents the two aspects equally in the interpretation despite the patriarchal masculinity perspective's predominance.

From the power relation perspective, it is discovered that the interpretation process and interpret team of Thematic al-Qur'an Interpretation and *Ilmi* Interpretation of the Ministry of Religion were dominated by masculine regime that brings the so-called the regime of truth, namely, among others, masculinity hegemony, Sunni orthodox, and heteronormative regime. Power relation that works in the team was masculine-domination power that eliminates female interpreters who have gender perspectives. The interpreter team member network owned six main affiliation networks: Jakarta al-Qur'an Science College, Jakarta Institute of al-Qur'an Science, the Jakarta Center for al-Qur'an Study and University of al-Azhar alumni network, Indonesian Institute of Science, and State Islamic University. Those gender regime power and intellectual networks work in the interpretation discourse to perpetuate certain ideology orthodoxies, from Sunni orthodoxy (on marital aspect), hegemonic masculinity orthodoxy, the government's program affirmation and heteronormative orthodoxy.

Keywords: Sexuality, Hegemonic Masculinity, Patriarchy, Thematic al-Qur'an Interpretation, *Ilmi* Interpretation

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ملخص الرسالة

هدفت هذه الرسالة إلى شرح جوانب بناء العلاقات الذكورية والسلطة الموجودة في خطاب الجنسانية في تفسير القرآن الموضوعي والتفسير العلمي لوزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا. اعتمد الباحث في هذه الرسالة على منهج نوعي على أساس بحث مكتبي مستخدماً منهج جنساني. كما استخدم الباحث منهجاً وصفيًا تحليليًا، ووصف به عملية تفسيرية قامت بها وزارة الشؤون الدينية بشكل تحليلي، مرتكزا على تفسير القرآن الموضوعي والتفسير العلمي المتعلقان بالجنسانية. استلهم الباحث في هذه الرسالة من نظريتين؛ نظرية الذكورة المهيمنة التي تشرح بناء الذكورة في خطاب الجنسية في التفسير الموضوعي والتفسير العلمي، ونظرية علاقات القوة والمعرفة كأداة لشرح أشكال القوة الموجودة في كتابة هذين التفسيرين. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال بيانات المكتبة، مدعومة ببيانات متخذة عند إجراء المقابلة مع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية كتابة التفسير. بينما البيانات الثانوية هي دراسات سابقة متعلقة بوزارة الشؤون الدينية وكذلك كتب ومقالات ذات علاقة بهذه الرسالة.

وحدثة هذه الرسالة هي تطوير نظرية الذكورة المهيمنة إلى ما يسمى بالذكورة الأبوية المعتدلة، وهي نموذج للذكورة الأبوية التي تمثل الذكورة المهيمنة الهرمية - الأبوية في خطاب سائد في التفسير الموضوعي والتفسير العلمي الصادرين من وزارة الشؤون الدينية، غير أنها في عدة قضايا تمثل المساواة بين الذكورة والأنوثة. نموذج الذكورة الأبوية المعتدلة يمثل نموذج الذكورة المهيمنة الذي ينقسم إلى الذكورة الأبوية النشطة، والذكورة الأبوية السلبية، والذكورة المتساوية. فالذكورة الأبوية النشطة ظهرت عند وجود الذكورة المهيمنة بنسبة سائدة في خطاب التفسير، ووجود الأنوثة بنسبة

قليلة. أما الذكورة الأبوية السلبية فظهرت عند استحضار الأنوثة على نطاق واسع في خطاب التفسير وغياب الذكورة أو ظهورها بنسبة ضئيلة للغاية، غير أن الأنوثة تصف الناحية الدونية للمرأة. وأما الذكورة المتساوية فأشارت إلى أن الذكورة والأنوثة حاضرتان بنسب متوازنة في خطاب التفسير، إلا أن هذا التوازن يبقى في منظور الذكورة الأبوية.

توصلت هذه الرسالة من منظور علاقات القوة إلى أن الفريق المشارك في كتابة تفسير القرآن الموضوعي والتفسير العلمي يتكون معظمه من علماء ذكور متصفين بأحقية خاصة، بما في ذلك: الذكورة المهيمنة، والأرثوذكسية السنية ومعارية المغايرة. إن علاقة القوة التي تعمل في فريق "تفسير القرآن الموضوعي" و "التفسير العلمي" هي قوة الذكورة المهيمنة التي تضع المفسرات ذوات منظور جنساني خارج النطاق. ويتكون أعضاء الفريق من ست شبكات رئيسية؛ كلية علوم القرآن (PTIQ) بجاكرتا، ومعهد علوم القرآن (IIQ) بجاكرتا، ومركز دراسات القرآن (PSQ) بجاكرتا، وخريجي جامعة الأزهر، والمعهد الإندونيسي للعلوم (LIPI)، والجامعات الإسلامية الحكومية (UIN). وتعمل هذه الشبكة من العلماء والمفكرين في تكريس أيديولوجيات معينة، سواء الأرثوذكسية السنية (في الزواج)، أو الأرثوذكسية الذكورية المهيمنة، وتأييد البرامج الحكومية، و الأرثوذكسية المعيارية المغايرة.

الكلمات الأساسية: الذكورة المهيمنة، النظام الأبوي، تفسير

القرآن الموضوعي، التفسير العلمي.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ص	syīn	sy	es dan ye
ض	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ط	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	ditulis ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> 'illah <i>karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------------	-------------------------------	--

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم أعدت لننشكرتم	ditulis ditulis ditulis	<i>A'antum</i> <i>U'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
--------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>As-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Żawi al-furūd</i> <i>Ahl as-sunnah</i>
------------------------	--------------------	--



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat-Nya serta hanya melalui petunjuk dan pertolongan-Nya, disertai dengan judul “*Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia*” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw., sahabat, kerabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Doktor Studi Islam dalam bidang keilmuan/konsentrasi Studi Qur`an dan Hadis (SQH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan disertasi ini, tidak sedikit hal baru dan bermanfaat yang peneliti temukan, sebagaimana juga masih begitu banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam disertasi ini. Namun demikian, peneliti berharap bahwa disertasi ini bisa memberikan manfaat baik bagi kalangan akademisi-peneliti maupun bagi komunitas akademisi studi al-Qur`an dan Tafsir baik di Indonesia maupun masyarakat global pada umumnya.

Atas petunjuk dan pertolongan Allah SWT, banyak pihak yang berkontribusi terhadap proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan penuh kerendahan hati, peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian disertasi, yaitu kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. DR. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Periode 2021 -sekarang, serta Prof. H. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Periode 2014 -2021, beserta unsur Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Program S3 dan seluruh staff Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc, M.Ag dan Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A selaku promotor yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan peneliti, telaten, sabar membaca, memberi masukan, koreksi serta motivasi terhadap penulisan disertasi hingga bisa terselesaikan.
4. Para Penguji Disertasi yang memberikan banyak masukan berharga demi perbaikan tulisan ini (Prof.Dr. Muhammad, M.Ag, Prof. Etin Anwar, M.A., Ph.D, Dr. Ahmad Baidowi, M.Si)
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di Program Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai pengelola MORA yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sebagai salah satu penerima Beasiswa 5000 Doktor angkatan pertama tahun 2015.
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Periode 2015-2019 (Bapak. Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H., M.H), serta Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag (Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2019-sekarang) beserta seluruh civitas akademika yang selalu mensupport peneliti untuk segera menyelesaikan pendidikan program doktoral ini.
8. Keluarga Besar Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya
9. Ketua, Sekretaris, beserta seluruh keluarga besar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Palangka Raya yang selalu memberikan bantuan dan doa selama proses akhir penulisan disertasi.
10. Para sahabat dan guru-guru penulis sejak di TK Melati Lanjas Muara Teweh, MIN Melayu Muara Teweh, MTsN Muara Teweh, MAN Muara Teweh.
11. Pimpinan dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Modern darul Hijrah Cindai Alus Putra Martapura, Kalimantan Selatan yang menjadi tempat sangat berkesan bagi fondasi intelektual, mental dan spiritual penulis dalam menuntut ilmu.

12. Pihak Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama, khususnya Kepala LPMQ Bapak Dr. H. Muchlis H. Hanafi, M.A beserta seluruh jajaran LPMQ yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengumpulan data baik melalui dokumentasi (buku-buku/bahan-bahan) serta wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam penyusunan *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama.
13. Guru-Guru tanpa pamrih yang mengajarkan al-Qur'an kepada penulis sejak pra al-Qur'an, tajwid hingga naghama al-Qur'an (Ibu Siti Aminah, Ustadz H. Syamsul Yahya, Ustadzah Hj. Norhanah, Ust.H. Raihansyah, K.H. Ahmad Fathoni, Lc, M.A., dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu)
14. Bapak Prof.Dr. H.M. Quraish Shihab, MA beserta keluarga besar staf dan guru-guru pengajar pada Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta, beserta kawan-kawan peserta Pendidikan Kader Mufasssir (PKM) angkatan tahun 2017 Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta (yang mulia Prof.Dr. Nasaruddin Umar, Prof. Dr. K.H.Said Aqil Husin al-Munawar, Dr.KH. Ahsin Sakho Muhammad, Dr.H. Muchlis H.M. Hanafi, Dr. Ulinnuha, Dr.H. Husnul Hakim, Dr. Faizah AliSibromalisi, dan lain-lain).
15. Segenap keluarga besar peneliti yang selalu mendoakan, mensupport, memberi semangat, baik lewat bantuan moril ataupun materiil, sehingga disertasi ini bisa terselesaikan. Kepada Istri tercinta Lidya Santi, yang setia menjaga anak-anak saat ditinggal ke Yogyakarta, anak-anak tercinta Nahla Azkia Robbany dan Muhammad Azzam Nur khuluqi, juga ibu mertua Masiah yang setia menjaga istri dan anak-anak saat saya ke Yogyakarta.
16. Kepada almarhum ibunda, Hj. Muliati Masri, yang tidak sempat menyaksikan anaknya menyelesaikan studi S3, Ayahanda H. Ridjalani Arius yang tak henti mendoakan dan mendukung peneliti dalam keadaan apapun, juga kepada Kakak tercinta (Astuti Surianingsih) dan adik-adik yang selalu mendukung dan mendoakan (Sophaan Sufian, Akhmad Alghifari, Siti Sholeha), kakak ipar (Junaidi, S.Ag) dan adik-adik ipar (Mersi, Fitria Yunita,

Abdul Bari) yang juga tiada kurang doa dan dukungannya. Terimakasih peneliti haturkan, atas segala doa dan dukungan semua.

17. Keluarga besar Kanda H. Muhammad Riban Satia dan Norlaina Riban Satia, yang sejak peneliti menempuh studi S2 sampai S3 dengan ikhlas tanpa pamrih baik moril maupun materil menyediakan rumah dan kendaraan pribadi selama penulis menuntut ilmu di Yogyakarta.
18. Kolega dan semua sahabat kelas Doktor Studi Qur`an dan Hadis (SQH) dan penerima beasiswa MORA angkatan tahun 2015 (Dr. Ilyas Daud, Dr. Alma`arif, Dr. Ahmad Mustafa/ Kyai Mus, Dr. Abdul Wahab (Gus Doel), Ilhamni, Yulia Rahmi, Samsurrahman/Kyai Sam, Mir`atunnisa) yang selalu memberi dan bantuan motivasi dalam setiap waktu sejak awal kuliah sampai saat ini.
19. Semua yang telah mendoakan dan membantu tanpa dapat disebut satu per satu, semoga diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah SWT.

Akhirnya peneliti sampaikan kepada semua pihak, terimakasih sebesar-besarnya, semoga kebaikan, Kesehatan, kesuksesan dan keselamatan selalu menyertai Bapak dan Ibu sekalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Palangka Raya, Desember 2021
Peneliti,

Akhmad Supriadi, S.H.I, M.S.I
NIM. 1530016046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
YUDISIUM	v
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vii
NOTA DINAS.....	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xix
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxvii
DAFTAR TABEL	xxx
DAFTAR GAMBAR	xxxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teori	25
G. Metode Penelitian	46
BAB II : NEGARA DAN POLITIK SEKSUALITAS	51
A. Negara dan Politik Seksualitas: Pergeseran dari Orde Baru ke Orde Reformasi	51
B. Politik Seksualitas pada Orde Reformasi	56
1. Penguatan Institusi Keluarga dan Pernikahan	56
2. Pemberdayaan Peran Perempuan	66
3. Penghapusan Kekerasan Seksual	72
4. Pengaturan Jumlah Keturunan	75
5. Pendisiplinan Regulasi dan Legalitas Pernikahan	78
6. Pendisiplinan Moralitas dan Orientasi Seksual	81

C.	Analisis Relasi Kuasa dalam Politik Seksualitas Pasca Orba	85
BAB III	: KEMENTERIAN AGAMA DAN PENYUSUNAN TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK DAN TAFSIR ILMI	91
A.	Kementerian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)	91
B.	Otoritas LPMQ dalam Penyusunan Tafsir dan Terjemah ..	94
C.	Proses Penyusunan <i>Tafsir al-Qur'an Tematik dan Tafsir Ilmi</i>	100
1.	Penyusunan Tafsir Tematik dan Tafsir Ilmi	100
2.	Proses Rekrutmen Penulis dan Penyusunan Tafsir	101
3.	Tersingkirnya Penulis Feminis	113
D.	Tim Penyusun Tafsir al-Qur'an Tematik dan Ilmi: Kasus Ayat-ayat/ Topik Seksualitas	114
E.	Tafsir al-Qur'an Tematik	131
F.	Tafsir Ilmi	138
G.	Analisis Relasi Kuasa	139
BAB IV	: KONSTRUKSI MASKULINITAS DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR TEMATIK DAN TAFSIR ILMI KEMENTERIAN AGAMA	143
A.	Maskulinitas dan Femininitas: yang Ideal dan Faktual	149
B.	Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik	159
C.	Pernikahan dan Keluarga Sakinah	163
1.	Pernikahan dan Keluarga Sakinah	163
2.	Pernikahan Bermasalah.....	163
a.	Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)	168
b.	Nikah <i>Sirri</i> (Di Bawah Tangan) dan Nikah ' <i>Urfi</i>	170
c.	Pernikahan Dini (Di Bawah Umur)	172
d.	Pernikahan Paksa	172
e.	Nikah Misyār	172

f. Absennya Isu Poligami dalam Bahasan <i>TTKA</i> Kementerian Agama	175
D. Kesehatan Reproduksi	177
1. Kehamilan, Kelahiran dan Penyusuan Anak	178
2. Keluarga Berencana	186
3. Kekerasan dan Pelecehan Seksual	193
4. Pemerksosaan	196
5. Perzinahan, Perselingkuhan dan Prostitusi	198
6. Aborsi.....	203
E. Etika, Hak-Hak dan Orientasi Seksual	208
1. Aurat, Busana, dan Pornografi	209
2. Hak/Otoritas Memilih Pasangan	216
3. Hak dalam Hubungan seksual.	219
4. Orientasi Seksual	222
5. Transgender/ Transeksual	229
BAB V : PENUTUP	239
A. Kesimpulan	239
B. Saran-Saran	243
DAFTAR PUSTAKA	245
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	261

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tabel dinamika Poltik Seksualitas Pada Orde Baru dan Pasca Orba, 88
Tabel III.1	Daftar Penulis TTKA dan TIKA dalam topik Seksualitas, 115
Tabel III.2	Afiliasi/Jaringan penulis dalam TTKA, 126
Tabel III.3	Afiliasi/Jaringan penulis dalam TIKA, 130
Tabel IV.1	Topik/wacana seksualitas dalam TTKA, 146
Tabel IV.2	Topik/wacana seksualitas dalam TIKA, 148
Tabel IV.3	Konstruksi Maskulinitas dan Femininitas dalam TTKA dan TIKA, 159
Tabel IV.4	Konstruksi Maskulinitas dalam Pernikahan dan Keluarga, 176
Tabel IV.5	Konstruksi Maskulinitas dalam Reproduksi dan Keluarga Berencana, 207
Tabel IV.6	Konstruksi Maskulinitas dalam hak-hak dan orientasi seksual, 234
Tabel IV.7	Konstruksi Maskulinitas Hegemonik dalam TTKA dan TIKA, 238

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Wawancara dengan Prof.Dr. Darwis Hude, M.A., 109
Gambar III.2	Wawancara dengan Dr. Ali Nurdin, M.A., 109
Gambar III.3	Wawancara dengan Dr. Muchlis H.M. Hanafi, M.A., 110
Gambar IV.4	Wawancara dengan Dr.K.H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A., 110
Gambar IV.5	Riset di kantor LPMQ Baitul Qur'an, 111
Gambar IV.6	Riset di Pusat Layanan Informasi LPMQ Baitul Qur'an, 111
Gambar IV.7	Riset Bahan Penelitian di perpustakaan LPMQ Kemenag RI, 112
Gambar IV.8	Diskusi dan wawancara dengan Dr. Ali Akbar (peneliti LPMQ), 112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2000-an hingga saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia telah banyak melahirkan banyak karya tafsir baik dengan menggunakan metode analitik maupun tematik. Jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya baik di Timur Tengah, Asia Selatan maupun Asia Tenggara, tampaknya tafsir yang disusun secara kolektif oleh Kementerian Agama adalah yang paling produktif dan variatif baik dari aspek kuantitas, metode maupun tema-tema yang diusung. Negara Mesir, sebagai negara yang memiliki tradisi kuat dalam kajian al-Quran dan banyak melahirkan ulama al-Qur'an dan tafsir, tercatat hanya memproduksi satu tafsir kolektif dalam bentuk tafsir ringkas dengan menggunakan metode *tahliṭī* (analitik), yaitu *Tafsir al-Wasīṭ li al-Qur'ān al-Karīm* merupakan karya berukuran sedang, disusun secara kolektif oleh sebuah komite ulama Mesir di bawah pengawasan dan bantuan Akademi Penelitian al-Azhar. Tafsir ini diterbitkan antara tahun 1972 sampai 1986, berukuran kecil yang ditulis oleh sebanyak 40 ulama serta diedit oleh sebuah panitia yang beranggotakan sepuluh orang. Edisi *Tafsir al-Wajīz* ini dicetak ulang pada tahun 1998 setelah dilakukan revisi, simplifikasi dan penyempurnaan oleh tim.¹

Peranan negara melalui Kementerian Agama yang turut terlibat dalam kajian al-Qur'an dan tafsir di Indonesia sejak kurun waktu 1960-an hingga akhir 1990-an baik dari aspek metodologi maupun peran dan akseptabilitasnya dalam masyarakat akademik. Pada

¹ Howard M. Pedersfield, *Kajian Al-Quran di Indonesia*, terj. Dari judul asli *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*, (Bandung, Mizan: 1996), 17-20, Lihat A.H. Johns "The Qur'an in the Malay World: Reflections on 'Abd al-Rauf of Singkel (1615 – 1693)" dalam *Journal of Islamic Studies* 9:2 (1998), Johanna Pink. "Tradition, Authority, and Innovation in Contemporary Sunni Tafsir: Towards a Typology of Qur'an Commentaries from the Arab World, Indonesia and Turkey" dalam *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 12 (2010), 59-61.

awalnya, *Tafsir al-Quran* karya Departemen Agama diterbitkan pertama kali pada tahun 1975. Penerjemahan dan penulisan tafsir al-Qur'an oleh Departemen Agama RI pada awalnya dilakukan melalui *Dewan Penerjemah* yang berada di bawah Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran al-Qur'an. Yayasan ini berdiri atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 26 tahun 1967.²

Negara lain yang menyusun tafsir secara kolektif (*jamā'i*) adalah Turki yang dimulai sejak tahun 1998. Tafsir kolektif tersebut berjudul *Qur'an Yolu: Tūrkçe Meāl ve Tefsir* yang ditulis oleh sebuah komite yang beranggotakan empat orang yakni Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıci, Sadrettin Gümüş dan Ibrahim Kafı Dönmez. Edisi pertama hadir pada tahun 2003-2004 dan edisi kedua pada tahun 2006. Walaupun ditulis secara kolektif, namun pada edisi *e-book* pada tahun 2008, nama para penyusun tidak tercantum pada tafsir tersebut.³

Dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya di dunia, dalam dua dasawarsa terakhir Kementerian Agama RI adalah yang paling produktif dalam menerbitkan produk tafsir, baik dalam bentuk *Tafsir Ringkas* terdiri dari (2) volume, *tafsir taḥlīlī* lengkap 30 juz (*al-Qur'an dan Tafsirnya*), disusul tafsir tematik, tafsir ilmu serta produk seputar Ulumul Qur'an.

Sejak tahun 2008 hingga 2017, Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran (LPMQ) telah menulis 42 volume tafsir tematik yaitu 26 volume produk tafsir tematik dan 16 volume tafsir ilmu dengan beragam judul. Produk *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (TAT)⁴ seri pertama (I) yang mulai diterbitkan sejak tahun 2008 - 2012 antara lain membahas tentang relasi umat beragama, pemberdayaan kaum lemah, keluarga sakinah, hari kiamat, pendidikan dan SDM, hukum dan HAM, ekonomi keumatan, peran dan kedudukan perempuan, etika dalam hidup bermasyarakat dan berkeluarga, lingkungan hidup, kesehatan, serta ketenagakerjaan.

² Lihat Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta:LKiS: 2013), 50.

³ Johanna Pink, *ibid.*, 60.

⁴ Pada penyebutan berikutnya, istilah *Tafsir al-Qur'an Tematik* (TAT) kadang-kadang akan menggunakan singkatan TAT saja.

Sedangkan pada produk tafsir tematik seri kedua (II) yang diterbitkan sejak 2013 terdiri dari 12 volume dengan mengangkat topik antara lain tentang pluralisme, tanggung jawab sosial, informasi dan komunikasi, generasi milenial, kenegaraan, jihad, moderasi beragama, dan lain sebagainya.

Di samping tafsir tematik, Kementerian Agama juga menyusun genre tafsir ilmi dengan melibatkan penulis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Genre tafsir ilmi ini berhasil menyusun 16 volume judul yang terkait dengan beragam topik baik ilmu biologi, fisika, astronomi, arkeologi, dan lain sebagainya.⁵

Dari sekian tema yang dibahas, baik pada produk tafsir Kementerian Agama salah satu tema yang nampaknya paling intens dan banyak dibahas adalah tentang seks, seksualitas dan penciptaan manusia.⁶ Tema ini tidak hanya dibahas dalam tafsir al-Qur'an tematik (*al-Tafsīr al-Mauḍū'i*) namun juga pada genre *Tafsir Ilmi (al-Tafsīr al-'Ilmī)*.⁷ Pada bagian tafsir tematik, isu seksualitas dibahas dalam sembilan seri/volume. Sedangkan dalam genre tafsir ilmi (*al-Tafsīr al-'Ilmī*) yang terdiri dari 16 volume, wacana seksualitas diulas dalam tiga (3) seri.⁸

⁵ Elaborasi terkait judul, tahun, dan tim penyusun genre tafsir al-Qur'an tematik dan tafsir ilmi ini secara lengkap diuraikan pada bab III bagian disertasi ini.

⁶ Seks (*sex*) adalah sebuah konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis. Sedangkan seksualitas adalah sebuah proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau berahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spiritualitas. Terdapat perbedaan substansial antara seks dan seksualitas, di mana seks adalah sesuatu yang bersifat biologis, *given* atau terberi/anugerah, dan dianggap sebagai sesuatu yang stabil. Sementara seksualitas merupakan konstruksi sosial budaya. Lihat Husein Muhammad. dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), 8-11.

⁷ Istilah atau penyebutan *Tafsir Ilmi* dalam tulisan ini akan disebut/ditulis lengkap *Tafsir Ilmi* atau menggunakan akronim TI saja.

⁸ Seri *Tafsir al-Qur'an Tematik (TAT)* yakni *Membangun Keluarga Harmonis, Kedudukan dan Peran Perempuan, al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I, al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik, Kesehatan dalam Perspektif al-Qur'an, Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan SDM, Pembangunan*

Keberagaman tema dan besarnya intensitas tema seksualitas yang dibahas dalam produk tafsir Kementerian Agama tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan isu yang urgen dan menarik. Perdebatan seputar isu LGBT antara kelompok heteronormativitas dan homonormativitas sepertinya menjadi salah satu pendorong diangkatnya tema tersebut dalam beberapa volume dan seri tafsir Kementerian Agama baik dalam tafsir ilmi maupun tafsir tematik. Di samping itu, pembahasana isu Keluarga Berencana (KB) dalam seri *Membangun Keluarga Harmonis* agaknya didorong oleh motivasi tertentu untuk melegitimasi program pemerintah dalam bidang kependudukan.

Keberagaman isu dan tema serta banyaknya jumlah produk tafsir yang disusun oleh Kementerian Agama tersebut menurut hemat penulis adalah hal yang positif dan patut diapresiasi. Namun demikian, dari aspek epistemologis dan sistem rekrutmen tim penyusun tafsir ada hal yang juga patut untuk dicermati secara akademik baik dari aspek konsistensi penafsiran maupun validitasnya.

Ditinjau dari aspek epistemologis, pada produk tafsir Kementerian Agama yang paling awal di era Orde Baru yaitu *al-Qur'an dan Tafsirnya* terdapat perbedaan dan dinamika penafsiran tentang ayat-ayat seksualitas. Misalnya ketika menjelaskan kata *azwāj* pada QS. al-Rum [30]:21, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I* seri tahun 1975 menerjemahkannya dengan “istri-istri”.⁹ Berbeda dengan terjemah tafsir tersebut, pada produk Terjemah al-Qur'an edisi 2002 dan 2019 serta genre *Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*

Generasi Muda, dan *Maqashid Syar'iah*. Sedangkan dalam genre tafsir ilmi yaitu seri *Penciptaan Manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, *Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, serta *Jiwa dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*.

⁹ Dewan Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1975), 559-550.

maupun *al-Qur'an dan Tafsirnya* 2010, kata *azwājā* pada ayat di atas ditafsirkan dengan “pasangan-pasangan”.¹⁰

Konstruksi yang menampilkan hegemoni maskulinitas penafsiran dapat dilihat dalam produk *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, khususnya terkait dengan peran perempuan dalam ranah publik (negara). Ketika membahas tentang kepemimpinan perempuan di Kerajaan Saba dalam QS. al-Naml [27]: 23-24, tafsir Tematik Kementerian Agama *Kedudukan dan Peran Perempuan* menjelaskan:¹¹

Ayat ini menggambarkan, bahwa pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, seorang perempuan memimpin sebuah negara, yaitu yang dikenal dengan ratu Bilqis dan kaumnya bernama kaum Saba'. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa sejarah dan kita mengetahui bahwa sejarah itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pada ayat ini pula, dijelaskan tentang Ratu Bilqis yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, tetapi dia dan kaumnya tidak beriman kepada Allah SWT, bahkan mereka adalah penyembah matahari. Ayat ini bahkan seolah-olah menggambarkan ketidakberhasilan seorang raja perempuan (Ratu Bilqis) di dalam membangun nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, dan tentu akan berdampak pada pembangunan bidang sosial kemasyarakatan lainnya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda: *‘Tidak akan pernah beruntung (sukses) suatu kaum/bangsa, yang menyerahkan segala urusannya (dipimpin) pada perempuan. (HR. Al-Tirmidzi dan Abi Bakrah)*. Meskipun terdapat perbedaan penafsiran terhadap hadis tersebut, penulis berpendapat dilihat dari tugas dan tanggungjawabnya yang sangat besar, kepala negara atau kepala daerah tidak sepatasnya diberikan kepada perempuan...”

Penafsiran ini terlihat paradoks/kontradiktif dengan pandangan lain dalam buku yang sama dalam sub bab asal-usul dan penciptaan

¹⁰ Lihat Tim Penyusun, *Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2008), 3-4., lihat juga Tim Penyusun, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 477-481.

¹¹ Lihat Tim Penyusun, *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2008), 69-70.

laki-laki dan perempuan, di mana ketika menjelaskan QS. Ali Imran [3]: 195, pandangan yang dikemukakan sangat pro terhadap kesetaraan gender sebagai berikut:

Ayat ini dan semacamnya adalah usaha al-Qur'an untuk mengikis habis segala pandangan yang membeda-bedakan laki-laki dengan perempuan, khususnya dalam persamaan kemanusiaan insaniah. Adapun beberapa teks keagamaan yang zahirnya mendiskreditkan perempuan, kita harus secara kritis membacanya dengan pemahaman yang tepat dan proporsional. Demikianlah terlihat al-Qur'an mendudukan perempuan pada tempat yang sewajarnya, serta meluruskan segala pandangan salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan kemuliaan kaum perempuan sebagaimana layaknya manusia secara keseluruhan. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.¹²

Konstruksi penafsiran yang bernuansa maskulinitas patriarkis juga tampak terkait hak-hak perempuan dalam beribadah dan peran di masjid. *Tafsir al-Qur'an Tematik* berpendapat bahwa kegiatan ibadah ritual dan aktivitas takmir masjid, laki-laki memiliki hak dan otoritas yang lebih besar karena adanya kondisi fisik yang berbeda. Pemahaman ini disandarkan kepada narasi QS. Ali Imran [3]: 35-36 terkait cerita Hanah, istri Imran yang mengidamkan anak laki-laki untuk berkhidmah di Baitul Maqdis sebagai imam dan pengelola masjid, namun kenyataannya yang lahir adalah perempuan. Pada kasus ini, al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah lebih mengetahui tentang bayi yang dikandung, dan bayi laki-laki dan perempuan secara seksual tidaklah sama dalam peran mereka dalam ibadah.¹³

Pandangan negatif terhadap perempuan seringkali dijadikan alat justifikasi terhadap terwujudnya dominasi patriarki dalam keluarga. Struktur atau hierarki gender yang patriarkis tersebut semakin dipertegas dengan banyaknya karya-karya tafsir al-Qur'an yang ditulis

¹² Lihat Tim Penyusun, *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan* ..., 32-41.

¹³ Lihat Tim Penyusun, *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2008), 63-64.

dengan semangat dan perspektif patriarkis.¹⁴ Penafsiran tersebut secara epistemologis menjadi hal yang menarik untuk ditelaah karena adanya kontradiksi dalam materi maupun epistemologi penafsiran. Di samping itu, ayat yang dikutip juga terkesan kurang komprehensif, karena tidak mencakup ayat-ayat lain yang berbicara tentang kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Aspek lain yang menarik adalah adanya bagian-bagian tertentu dalam tafsir ini yang terkesan bias dan tidak ramah gender, bahkan terkesan menonjolkan sisi maskulinitas khususnya terkait dengan kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara.¹⁵

Masih terkait dengan ayat-ayat tentang seksualitas, nuansa inkonsistensi dalam epistemologi juga dapat ditemukan ketika membahas tentang penciptaan manusia. Misalnya, ketika membahas tentang asal muasal dan proses penciptaan manusia dalam QS an-Nisa [4]:1), *Tafsir Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan* menjelaskan:¹⁶

Menurut mayoritas pakar tafsir, maksud frasa *nafs wāhidah* pada ayat di atas adalah Adam dan kata *zawj* (pasangan) adalah Hawa, perempuan pertama yang menjadi istri Adam. Hawa itu, oleh pandangan sebagian mufasir, diciptakan dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam yang dalam ayat di atas disebut dengan ‘daripadanya’ (*minhā*). Namun menurut ar-Razi, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang hal ini...Oleh karenanya, dalam pandangan ‘Atiyah Saqr dalam *Fatawa al-Azhar*, berdasarkan penjelasan ar-Razi dalam tafsirnya, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam bukanlah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Dengan demikian sangat mungkin bila Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, yaitu tanah bukan dari cahaya atau api...Demikianlah, sampai titik ini kita dapat berkata bahwa tidak ada satu petunjuk yang pasti (*qaṭ’ī*) dari ayat al-Qur’an yang dapat mengantarkan kita untuk menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, atau

¹⁴ Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur’an dan Penafsiran Modern Menghormati Kaum Hawa* (Bandung: Marja, 2011), 44.

¹⁵ *Ibid.*, 69-70.

¹⁶ *Ibid.*, 33-39.

unsur penciptaannya berbeda dengan laki-laki...Sebenarnya, surah an-Nisa yang kita bicarakan ini memang kurang relevan dijadikan dasar dalam menerangkan asal-usul kejadian manusia secara biologis, termasuk asal-usul Hawa sebagai simbol perempuan..”.

Selanjutnya, pernyataan tafsir ini menghadirkan kesan adanya konstruksi emansipatoris, dengan mengutip pandangan Quraish Shihab yang menyebut bahwa terdapat banyak pandangan dalam teks keagamaan yang menyatakan adanya persamaan ontologis dari aspek asal muasal kejadian biologis Adam dan Hawa seperti disebut dalam QS. QS. al-Isra [17]:70, Ali Imran [3]: 195.¹⁷

Namun, penafsiran tersebut berbeda dengan penafsiran *al-Qur'an dan Tafsirnya* edisi tahun 2010, di mana edisi tafsir ini cenderung masih dalam konstruksi maskulinitas-patriarkis, karena memahami frasa *nafs wāḥidah* sebagai Adam, sedangkan *zawjahā* adalah Hawa. Tafsir ini juga divalidasi dan dilegitimasi dengan menggunakan analisis ilmu biologi tentang kromosom XY (laki-laki) dan kromosom perempuan (XX) yang disebut tidak mungkin membentuk kromosom XY (laki-laki):¹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat adanya semacam inkonsistensi dan ambiguitas dalam epistemologi penafsiran terhadap ayat ayat tentang seksualitas dan penciptaan manusia khususnya pada QS. an-Nisa [4]: ayat1, padahal produk-produk tafsir tersebut disusun pada era yang sama dan dalam tahun yang berdekatan.

Selanjutnya, pada wacana seksualitas, terlihat adanya unsur relasi kekuasaan dan pengetahuan yang cukup kuat dalam berbagai wacana. Sebagai contoh, pada bagian tafsir ilmu tentang seksualitas, diuraikan sub bab khusus dengan judul *Keturunan* yang secara spesifik membahas tentang pentingnya program Keluarga Berencana (KB). Pada bagian ini diterangkan tentang ayat-ayat dan hadis yang menjadi dasar tentang program Keluarga Berencana (KB), serta berbagai

¹⁷ *Ibid.*, 33-39.

¹⁸ Lihat Tim Penyusun, Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 110-112. Lihat juga Tim Penyusun, *Tafsir Tematik: Penciptaan Manusia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 18.

argumentasi yang mendukung tentang pentingnya program keluarga berencana tersebut. Pada bagian ini misalnya disebutkan: “*Program Keluarga Berencana (KB) adalah amat penting bagi suksesnya pembangunan...Diyakini bahwa betapa pun sukses perbaikan ekonomi, tetapi apabila jumlah penduduk tidak dikendalikan, maka pembangunan akan sia-sia*”¹⁹. Legitimasi dan dukungan terhadap program keluarga berencana ini juga hadir pada volume yang berbeda dalam edisi tafsir tematik, yakni *al-Qur’an dan Isu-isu Kontemporer I* dalam sub tema *Kependudukan dan Keluarga Berencana*.²⁰

Di samping itu, juga terlihat bahwa terdapat ideologi dan relasi kekuasaan dan ilmu pengetahuan dari produk tafsir tematik dan ilmi—khususnya terkait seksualitas tersebut. Ideologi dan kepentingan itu misalnya tidak hanya untuk melegitimasi pandangan ortodoksi tafsir tentang seksualitas yang selama ini sudah menjadi pandangan *mainstream*, tetapi pada bagian-bagian tertentu juga sebagai perlawanan terhadap wacana homonormativitas (kelompok yang mendukung otonomi seksual bagi kaum LGBT) hadir dalam tafsir Kementerian Agama RI.

Selain itu, relasi kuasa dalam bentuk normalisasi terhadap wacana LGBT dapat ditemukan dalam seri tafsir tematik dalam volume *Al-Qur’an dan Isu-isu Kontemporer II* pada sub bahasan *Penyimpangan Seksual (Homoseksual dan Lesbian dalam Pandangan Hukum Islam)*. Narasi awal pada tafsir ini secara eksplisit mengandung perlawanan dengan menyoroti maraknya kelompok liberal, antara lain gerakan kesetaraan hak seksual oleh kelompok gay dan lesbian di Indonesia yang menggunakan penafsiran ayat al-Qur’an untuk melegitimasi gerakan dan orientasi seksual mereka.²¹

¹⁹ Tim Penyusun, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 69-77.

²⁰ Tim Penyusun, *Tafsir Al-Qur’an, Tematik Al-Qur’an dan Isu-isu Kontemporer I* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 276-296.

²¹ Tim Penyusun, *Tafsir Al-Quran Tematik: Al-Qur’an dan Isu-isu Kontemporer II*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 114-142.

Jika dikaitkan dengan relasi antara kekuasaan, agama dan seksualitas, relasi antara negara dengan agama di Indonesia dapat dilihat dari kepentingan negara untuk mengatur berbagai kebijakan pembangunan melalui isu-isu seperti seksualitas dan gender. Persoalan seksualitas dan gender sebagai bagian dari aspek pembangunan dan kehidupan agama, berbangsa dan bernegara menjadi perhatian dari negara. Sejak zaman orde baru, kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan seksualitas dapat dibuktikan dari terbentuknya berbagai institusi, organisasi, lembaga hingga produk perundang-undangan yang meregulasi seksualitas dan pengarusutamaan gender.

Dibentuknya lembaga atau badan seperti badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan intervensi dalam bentuk regulasi seksualitas dalam rangka mengatur pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).²² Di samping itu, secara politis – ideologis, negara—dalam hal ini Orde Baru, juga mengatur urusan seksualitas dan gender dengan mengendalikan perempuan dan istri para PNS sebagai anggota KORPRI melalui organisasi Dharma Wanita. Organisasi Dharma Wanita yang secara struktural–hierarkis berada di bawah KORPRI pada era Orde baru, diatur oleh negara baik secara sosial maupun politik dan berada di bawah kontrol dan kendali serta mengabdikan kepada suami mereka.²³

Pada era reformasi, negara membentuk *Komnas Perempuan* dan mengeluarkan Undang-undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 yang bertujuan melindungi perempuan dari korban kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Sebelumnya pada era Orde Baru, negara hadir untuk meregulasi urusan seksualitas—dalam hal ini perkawinan dan perceraian melalui Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

²² Julia I. Suryakusuma, “Seksualitas dalam Pengaturan Negara”, dalam Liza Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2004), 358-359.

²³ *Ibid.*, 358-362.

yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah nomor 09/ 1975 sebagai implementasi dari Undang-undang dimaksud.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat bahwa unsur relasi kuasa pengetahuan merupakan aspek yang sangat kuat dalam produk tafsir ilmi dan tematik Kementerian Agama khususnya dalam wacana seksualitas. Dengan kata lain, melalui relasi kuasa-pengetahuan, produk tafsir ilmi dan tematik Kementerian Agama yang berkaitan dengan seksualitas dan penciptaan manusia berupaya untuk mendukung dan meligitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mewujudkan harmoni seksual dalam mewujudkan keluarga serta tatanan sosial.

Berangkat dari uraian di atas, penulis menganggap penting untuk mengangkat isu seksualitas dalam tafsir kementerian agama dari perspektif konstruksi maskulinitas dan relasi kuasa-pengetahuan hadir dalam wacana seksualitas baik dalam produk tafsir al-Qur'an tematik maupun tafsir ilmi. Pada penyebutan selanjutnya *Tafsir al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama akan disingkat dan disebut TTKA, sedangkan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama akan disingkat dengan TIKA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan asumsi dan problematika di atas, untuk menjawab kegelisahan akademik tersebut penulis memformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Kementerian Agama merasa perlu menulis *Tafsir Tematik* dan *Tafsir Ilmi* secara tersendiri serta memasukkan tema-tema terkait seksualitas di dalamnya?
2. Bagaimana *Tafsir Tematik* Kementerian Agama (TTKA) dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama (TIKA) menafsirkan tema-tema seksualitas?

²⁴ John w. Molineaux & Paul J. Gertler, "The Impact of Targetted Family Planning Program in Indonesia" dalam Jurnal *Population and Development Review*, Vo. 26, Supplement: Population and Economic Change in East Asia, 60-65. Lihat juga Julia I. Suryakusuma, "Seksualitas dalam Pengaturan Negara", 358.

3. Bagaimana konstruksi maskulinitas direpresentasikan dalam penafsiran seksualitas tersebut, dan bagaimanakah relasi kuasa berperan dalam konstruksi tersebut?

Dalam disertasi ini penulis berargumen bahwa maskulinitas hegemonik yang hadir dalam *TTKA* dan *TIKA*, sebagaimana yang tampak dalam penafsiran tema-tema seksualitas adalah "maskulinitas patriarkhis lembut", dalam pengertian bahwa secara substansial penafsirannya berbasis pada paradigma maskulinitas yang patriarkhis, baik secara aktif maupun pasif, namun dalam beberapa tema bersifat setara. Tetapi, kesetaraannya berdasarkan perspektif dan pengalaman maskulinitas yang patriarkhis.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengungkap dua permasalahan pokok di atas, yaitu:

1. Mengungkap penyebab yang melatarbelakangi penulisan *TTKA* dan *TIKA*, terutama dalam wacana seksualitas.
2. Mendeskripsikan penafsiran *TTKA* dan *TIKA* tentang tema-tema seksualitas.
3. Menjelaskan konstruksi maskulinitas yang hadir dalam wacana seksualitas pada *Tafsir al-Qur'an Tematik* (TAT) dan *Tafsir Ilmi* (TI) serta menguraikan peran relasi kuasa dalam konstruksi maskulinitas tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Dilihat dari segi manfaat dan kegunaannya, riset ini mempunyai signifikansi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan teoretik, yaitu model baru pengembangan teori maskulinitas hegemonik dalam studi gender khususnya yang berkaitan dengan al-Qur'an dan tafsir.
- b. Manfaat berikutnya adalah untuk menunjukkan bahwa studi al-Qur'an dan tafsir harus didekati dengan pendekatan yang

beragam, khususnya dalam studi gender, maskulinitas dan seksualitas karena produk al-Qur'an dan tafsir—terutama yang ditulis oleh institusi negara sangat terkait erat dengan rezim, ideologi, serta jaringan kuasa, sehingga dengan kajian menggunakan multi pendekatan (integratif – interkoneksi) maka hasil penelitian akan semakin kaya dan memunculkan banyak spektrum baik teologis, sosial maupun politik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari kajian ini adalah menjadi dasar bagi penelitian berikutnya, terutama penelitian studi tafsir dengan menggunakan pendekatan gender dan seksualitas, terutama dengan menggunakan teori maskulinitas dan teori relasi antara kekuasaan dan pengetahuan untuk mengungkap motif, dinamika dan subjektivitas pembuat wacana, yakni produk-produk tafsir yang disusun oleh Kementerian Agama. Selain itu, riset ini dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus kritik yang konstruktif bagi Kementerian Agama dalam revisi produk tafsir yang disusun berikutnya.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui posisi dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini, akan dipaparkan beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik penelitian ini. Dari sini, penulis melakukan *mapping* penelitian terdahulu menjadi dua bagian. *Pertama*, kluster penelitian yang terkait dengan seks dan seksualitas, termasuk yang berkaitan dengan relasi antara kuasa, pengetahuan dan seksualitas. *Kedua*, kajian al-Qur'an dan tafsir yang terkait Kementerian Agama, khususnya berkaitan dengan kajian epistemologi al-Qur'an. Uraian dari kedua kluster tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

1. Penelitian terkait Seksualitas, Maskulinitas dan Tafsir.

Kajian yang membahas relasi antara seksualitas dan gender dengan al-Qur'an dan tafsir cukup banyak dilakukan baik dengan menggunakan pendekatan gender, politik, relasi kuasa maupun melihat aspek hermeneutika tafsir yang bekerja dalam sebuah produk terjemah al-Qur'an dan tafsirnya.

Annisa Helie dan Homa Hoodfar (ed.) dalam buku *Sexuality in Muslim Context Restrictions and Resistance* membahas tentang beragam dinamika relasi gender dan keragaman seksual dalam konteks masyarakat muslim kontemporer.²⁵ Di dalam buku tersebut, isu yang dibahas sangat beragam, mulai dari politisasi tubuh perempuan, pergeseran ideologi seksual di Iran, kriminalisasi seksualitas di Pakistan, ketidaksetaraan gender dalam kontrak perkawinan dalam tradisi hukum positif di dunia muslim, hingga isu LGBTIQ di masyarakat kelas menengah di Bangladesh. Tulisan-tulisan tersebut meskipun menggunakan pendekatan gender, politik dan relasi kuasa, namun tidak ada yang secara spesifik terkait dengan kajian gender dan relasi kuasa dalam al-Qur'an dan Tafsir Kementerian Agama.

Selanjutnya, Scott Siraj al-Haq Kugle menulis kajian kritis terhadap isu homoseksualitas (LGBTIQ) dan transgender dalam perspektif muslim kontemporer yang disuarakan oleh kelompok muslim minoritas di Barat dalam karyanya *Homosexuality in Islam*. Di dalam buku ini, Kugle menguraikan hasil risetnya tentang *living Qur'an* dan tafsir terkait suara kelompok muslim minoritas di Eropa yang berupaya melakukan re-interpretasi ulang terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan penafsiran para ulama yang selama ini dianggap mengecam para pelaku hubungan seks sejenis yang disebut LGBTIQ.²⁶ Dalam konteks kajian al-Qur'an dan tafsir, riset Kugle tersebut secara spesifik hanya berbicara tentang isu heteronormativitas versus homonormativitas yang disuarakan oleh kelompok muslim minoritas. Meskipun menyentuh kajian seksualitas dan gender, namun tulisan ini dari obyeknya hanya memotret isu orientasi dan hak-hak seksual, tidak terkait dengan produk tafsir Kementerian Agama yang menjadi fokus kajian disertasi ini. Adapun kajian yang secara spesifik mengulas tentang isu maskulinitas dalam tradisi muslim ditulis oleh

²⁵ Anissa Helie and Homa Hoodfar (ed.), *Sexuality in Muslim Context Restriction and Resistance*, (London and New York: Zed Books Ltd, 2012).

²⁶ Scott Siraj al-Haq Kugle, *Homosexuality in Islam Critical Reflection on Gay, Lesbian and Transgender Muslim*, (Oxford, Eangland: Oneworld Publication, 2011).

Amanullah De Sondy dalam buku *The Crisis of Islamic Masculinities*.²⁷

Amina Wadud dalam karyanya *Qur'an and Woman* melakukan sebuah kajian gender yang kritis terhadap al-Qur'an dan tafsir. Melalui pendekatan hermeneutik, Amina Wadud mengemukakan argumentasi kesetaraan gender baik dalam aspek penciptaan, teo-eskatologis, hingga peran publik antara laki-laki dan perempuan. Dengan analisis sosio-historis, Wadud juga melakukan kritik bias gender dan nuansa patriarki dalam penafsiran al-Qur'an baik dalam persoalan perceraian, poligami, saksi, kewarisan, hingga hak asuh anak.²⁸

Walaupun kajian Wadud terkait dengan aspek hermeneutika dan gender, namun fokus studi dalam bukunya tersebut mengkritik karya-karya tafsir ulama muslim abad klasik dan pertengahan yang dianggap bias gender dan sarat dengan dominasi patriarkis. Sementara karya tafsir di Indonesia termasuk produk Kementerian Agama tidak termasuk kajian yang dibahas dalam tulisan Wadud.

Seperti halnya Amina Wadud, Karen Bauer dalam karyanya *Gender Hierarchy in the Quran: Medieval Interpretations, Modern Response* juga melakukan kajian gender berbasis al-Qur'an dan tafsir. Namun berbeda dengan Wadud yang lebih menekankan kepada pendekatan hermenetik dan analisis kritis langsung terhadap ayat-ayat al-Qur'an, Bauer berupaya melakukan pemetaan terhadap produk tafsir abad pertengahan terkait pandangan mereka terhadap gender dan seksualitas dalam kaitan dan pengaruhnya dengan tafsir-tafsir modern. Berdasarkan risetnya, Bauer menemukan konstruksi tafsir gender abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-historis yang berkembang pada saat itu. Meskipun pemikiran gender dalam karya tafsir abad pertengahan diakuinya memiliki pengaruh terhadap tafsir abad modern, namun menurutnya konstruksi gender dalam tafsir abad modern juga dibentuk oleh sosio-historis yang berbeda dengan pandangan gender yang relatif berbeda pula dibandingkan abad

²⁷ Amanullah De Sondy, *The Crisis of Islamic Masculinities*, (London and New York: Bloomsbury Publishing, 2015).

²⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, (New York: Oxford University Press, 1999).

pertengahan yang cenderung patriarkis. Dengan kata lain, konstruksi gender dari abad pertengahan menuju abad modern mengalami pergeseran sesuai dengan dinamika dan semangat zaman yang berbeda.²⁹

Zaitunah Subhan dalam riset disertasinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membahas bias gender dalam tafsir al-Qur'an dalam upaya membangun kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kajiannya terkait aspek gender fokus terhadap bias gender dalam Islam khususnya menyangkut seksualitas, penciptaan dan kodrat perempuan dalam reproduksi, peran publik serta konsep kemitrasejajaran dalam produk perundang-undangan. Untuk melakukan analisis, ia menggunakan metode tafsir tematik dengan menggunakan metode gabungan induktif – deduktif.³⁰

Nasaruddin Umar dalam disertasinya mengkritik sejumlah pandangan bias gender dalam penafsiran, khususnya terkait kaidah kebahasaan. Melalui argumentasi berbasis pendekatan feminis, ia menulis disertasi untuk menunjukkan bahwa al-Qur'an merupakan kitab yang mengusung kesetaraan gender. Ia melakukan kajian kritis terhadap konsep gender dalam al-Qur'an baik menyangkut asal usul penciptaan, substansi kejadian, prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam aspek penciptaan, teologis, sosial dan eskatologis. Di samping itu, Nasaruddin Umar juga melakukan kritik terhadap pandangan bias gender dalam pemahaman dan penafsiran teks. Dalam penulisan disertasi ini, Nasaruddin Umar menggunakan metode tafsir tematik dengan menggunakan pendekatan linguistik-hermeneutik, semantik, gender, dan sosio-antropologis.³¹

Meski secara tematis memiliki persamaan dengan kajian Zaitunah Subhan, namun kajian Nasaruddin Umar memiliki distingsi

²⁹ Karen Bauer, *Gender Hierarchy in the Qur'an: Medieval Interpretations, Modern Respons*, (New York: Cambridge University Press, 2015).

³⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999). 12, 171-182.

³¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

tersendiri khususnya dari aspek pendekatan. Di samping itu, secara linguistik hermeneutik, Nasaruddin Umar lebih berhasil dalam mengajukan argumen kesetaraan gender dalam al-Qur'an dengan menggunakan analisis linguistik – semantik yang lebih mendalam.

Yunahar Ilyas dalam hasil riset disertasinya tentang kesetaraan gender di UIN Sunan Kalijaga melakukan pemetaan dan analisis komparatif tentang gender dalam al-Qur'an terhadap dua karya tafsir kontemporer di Indonesia yakni *Tafsir an-Nur* karya Hasbi al-Shiddiqi dan *Tafsir al-Azhar* karya Hamka. Fokus tema yang dikaji adalah terkait kesetaraan gender dalam penciptaan, hak kenabian, perkawinan, kewarisan dan peran publik dalam dua karya tafsir tersebut. Riset tersebut merupakan kajian pustaka murni yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir, hermeneutik, gender dan teologis filosofis.³²

Berdasarkan analisisnya ditemukan bahwa kedua tafsir tersebut dapat dikategorikan sebagai tafsir *tahlīlī* (analitik) dengan bersumber kepada rasio atau *tafsīr bi al-ra'i*. Namun demikian *Tafsir Al-Azhar* lebih menonjol dari aspek *adabī – ijtīmā'ī* (sastra budaya–sosial kemasyarakatan) dari pada aspek fikih, teologi, filsafat dan tasawuf. Sementara itu *Tafsir An-Nur* dapat diklasifikasikan sebagai tafsir zang bercorak sosial budaya namun minus nuansa sastra. Dalam menafsirkan ayat-ayat gender tentang kenabian, poligami, perkawinan beda agama, kewarisan dan kepemimpinan, kedua tafsir tersebut menurut Yunahar Ilyas sangat rasional, objektif serta cenderung tidak bias gender. Namun pandangan keduanya menjadi tidak jelas alias mengambang ketika membahas tentang penciptaan perempuan dan perwalian.³³

³² Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an: Studi Pemikiran para Mufassir*, Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015), 9-11.

³³ *Ibid*, 353-355.

2. Penelitian terkait al-Quran, Tafsir dan Kementerian Agama.

Anthony H. Johns dalam tulisannya tentang khazanah al-Qur'an dan tafsir di Melayu menjelaskan tentang karya tafsir awal di Indonesia, yakni *Tafsir al-Sinkili*. Dalam artikel tersebut, A.H. Johns menegaskan eksistensi *Tafsir Turjumān al-Mustafīd* sebagai karya tafsir 30 juz pertama yang hadir di Nusantara. Di samping itu, ia juga menganalisis model penerjemahan teks al-Qur'an dalam *Tafsir Turjumān al-Mustafīd* serta epistemologi dan sumber rujukan yang digunakan.³⁴

Selain itu, Anthony H. Johns dalam artikelnya *Quranic Exegesis in the Malay – Indonesian World: an Introductory Survey* secara spesifik menyinggung peran Kementerian Agama dalam menyusun produk al-Qur'an dan Tafsir. Melalui pendekatan sejarah, John melakukan pemetaan terhadap terjemah al-Qur'an sebagai produk pertama Kementerian Agama pasca kemerdekaan tahun 1945 sebagai karya kolektif yang diinisiasi oleh negara.³⁵

Howard Federsfield dalam karyanya *Popular Indonesian Literature of the Quran* yang menyebutkan sejak abad XVI bahkan mungkin sebelumnya telah ada ulama yang mengkaji al-Qur'an di Nusantara, hingga mencapai puncaknya pada abad XX (modern dan kontemporer).³⁶ Federspiel memetakan secara historis-kronologis berbagai literatur yang digunakan dalam studi al-Qur'an di Indonesia. Dalam tulisannya itu, Federspiel mencatat sejak tahun 1967 Departemen Agama telah menyusun dua produk seputar al-Qur'an yaitu terjemah al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an 30 juz dalam bentuk *tahlīlī*.³⁷

Selanjutnya, Islah Gusmian, dengan menggunakan berbagai pendekatan dan teori, (sejarah, epistemologis, corak, ideologi)

³⁴ Anthony H. Johns. "Quranic Exegesis in The Malay: An Introductory Survey" dalam Abdullah Saeed (ed.) *Approaches to the Qur'an in the Contemporary Indonesia*, (New York: Oxford University, 2005), 17-35.

³⁵ *Ibid.*, 32-33.

³⁶ *Ibid.*, 17-20.

³⁷ Howard M. Federsfield, *Kajian Al-Quran...*, 17-20.

memetakan beragam karya-karya tentang al-Qur'an dan tafsir di Nusantara telah hadir sejak abad pertengahan yang dipelopori oleh ulama Melayu di Sumatra (Aceh) dengan beragam ideologi, corak, dan pendekatan.³⁸

Sebagaimana halnya Ferderspiel, Islah memetakan beragam kitab tafsir yang ada di Indonesia. Namun berbeda dengan Federspiel, Islah lebih fokus pada aspek epistemologis–metodologis, corak serta ideologi yang ada dalam karya tafsir tersebut. Di samping itu juga menyinggung peranan negara melalui Departemen Agama yang turut terlibat dalam kajian al-Qur'an dan tafsir di Indonesia mulai tahun 1960-an hingga akhir 1990-an, baik dari aspek metodologi maupun peran dan akseptabilitasnya dalam masyarakat akademik. Hal ini berarti kajian al-Qur'an dan tafsir tidak hanya didominasi oleh penulisan secara individu, tetapi juga diinisiasi dan dilakukan secara kolektif (tim) oleh negara melalui Departemen Agama (saat itu).

Keterkaitan antara negara, politik dan al-Qur'an dibahas oleh Moch. Nur Ichwan dalam artikelnya *Negara, Kitab Suci dan Politik: Terjemah Resmi al-Qur'an di Indonesia*. Artikel ini mengungkap adanya relasi kuasa dalam produk terjemahan al-Qur'an yang diinisiasi oleh pemerintah di mana terdapat ideologi negara dan bias sektarian dalam komposisi para penerjemah yang hadir dalam tiga edisi terjemah al-Qur'an Kementerian Agama yaitu *Qur'an dan Terjemahnya* (QDT) edisi 1969, 1974, dan 1990.³⁹ Tulisan ini, meski menggunakan relasi kuasa, namun aspek terjemahan yang dikaji bersifat umum yaitu terkait dinamika ideologi dan sektarianisme yang hadir dalam penerjemahan tiga edisi QDT, seperti kelompok NU, Sunni, Reformis dan Wahabi yang berkontestasi dalam terjemahan itu.

Kajian yang masih berkaitan dengan terjemah al-Qur'an Kementerian Agama adalah artikel Akhmad Supriadi, Moch. Nur Ichwan dan Syihabuddin Qalyubi terkait problematika gender dalam

³⁸ Lihat Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia ...* 50.

³⁹ Moch. Nur Ichwan, "Negara, Kitab Suci dan Politik: Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia" dalam Henri Chambert Loir (penyunting) *Sadur Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), 3.19.

perubahan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an pada kasus kata *al-zaūj/al-azwāj*, khususnya ayat-ayat tentang ontologis penciptaan perempuan dan pasangan surgawi. Tulisan ini menemukan ada pergeseran makna ke arah yang lebih ramah gender terkait makna kata *al-zaūj/al-azwāj* yang asalnya “istri” menjadi “pasangan”, namun dalam ayat dan kasus lain, makna kata tersebut masih tetap diterjemahkan sebagai “istri”. Meski telah bergeser ke arah yang lebih setara dan ramah gender, namun dari aspek politik, ideologi dan relasi kuasa sesungguhnya masih menempatkan maskulinitas patriarkis lebih unggul dari perempuan.⁴⁰ Artikel ini memotret aspek terjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI dalam tiga edisi yaitu edisi 1969, 1990 dan 2002 dengan melihat aspek gender, relasi kuasa, serta ideologi penerjemah yang bekerja di dalamnya.

Terkait dengan produk tafsir Kementerian Agama, Ahmad Muhammad Diponegoro menulis disertasi *Tafsir Ilmi Kisah Adam dan Musa dalam Surat al-Baqarah (Studi terhadap al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama)*, menggunakan penelitian kualitatif berbasis *library research* melalui metode studi kritis dan pendekatan epistemologi.

Berdasarkan hasil riset, Muhammad Diponegoro menyatakan kisah Adam dan Musa dapat diklasifikasikan sebagai studi biopsikologi. Dari aspek referensi dan sumber penafsiran yang digunakan berdasarkan sumber terbaru baik dari sumber-sumber sains maupun kitab-kitab tafsir yang terpercaya sehingga nuansa saintifik cukup terasa dalam penafsiran.⁴¹

Dalam kaitan Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang mengatur urusan keagamaan, disertasi Moch. Nur Ichwan yang berjudul *Official Reform of Islam: State Islam and The Minister of*

⁴⁰ Akhmad Supriadi, dkk, “Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis? Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan Perempuan dan Pasangan Surgawi” dalam *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, Vol 12, no 1, Juni 2009, 1-18.

⁴¹ Ahmad Muhammad Diponegoro, *Tafsir Ilmi Kisah Adam dan Musa dalam Surat al-Baqarah: Studi Terhadap al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama, Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*: 2013), x.

Religious Affairs in Contemporary Indonesia 1966-2004.⁴² Kajian ini menjelaskan tentang pengaruh sosial politik serta ideologi pada era Orde Baru dan pasca Orde Baru (era Reformasi) sampai tahun 2004 terhadap proses reformasi Islam resmi yang terjadi dalam tubuh Kementerian Agama dalam urusan Pendidikan Islam, hukum Islam, haji dan umrah serta filantropi Islam (zakat dan wakaf). Dalam kaitannya dengan disertasi penulis, kajian dalam disertasi ini tidak menyentuh aspek perubahan dan dinamika yang terjadi dalam tubuh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ) sebagai Lembaga yang bertugas mengurus tentang al-Qur'an dan tafsir sebagai obyek kajian dalam disertasi penulis.

Islah Gusmian dalam disertasinya tentang relasi kuasa Orde Baru dalam Tafsir al-Qur'an di Indonesia melakukan pemetaan terhadap dialektika tafsir al-Quran dengan politik rezim Orde Baru. Melalui pendekatan sosio-historis model Muhammad Arkoun dan kritik analisis linguistik (*critical linguistic*), Islah membuat tipologi tafsir yang hadir di era Orde Baru ke dalam tiga kategori, yaitu perspektif tafsir Gincu (mendukung dan melegitimasi), tafsir "diam alias "bungkam", serta tafsir yang melawan alias kritis.⁴³

Penelitian disertasi yang menggunakan teori relasi kekuasaan – pengetahuan dalam wacana tafsir Indonesia juga dilakukan oleh Ulya dalam karya disertasinya pada UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Hubungan Kekuasaan–Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr QS an-Nisa [4]:59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955 1966*. Dengan menggunakan beberapa teori antara lain teori relasi kuasa–pengetahuan Michael Foucault dan teori otoritasnya Khaleed Abou al-Fadhl, Ulya menemukan fakta bahwa pemaknaan dan penafsiran kata "*Ulu al-Amr*" dalam *Tafsir al-Azhar* memiliki makna "penguasa" atau "pemimpin" yang harus lahir dari satu kelompok dengan yang memilihnya (*insider*) atau harus dari

⁴² Moch. Nur Ichwan " Official Reform of Islam: State Islam and The Ministry of Religious Affairs 1966-2004", *Disertasi*, Tillburg University: 2006.

⁴³ Islah Gusmian, *Dialektika Tafsir al-Qur'an dan Praktik Politik Rezim Orde Baru*, *Disertasi* pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014), 301-302.

kalangan muslim sendiri. Hamka sebagai seorang mufasir sekaligus seorang anggota konstituante dari Masyumi meneguhkan penafsirannya tentang wacana teologis Ulu al-Amr dalam QS. an-Nisa [4]:59 dengan membuat suatu penafsiran yang mengarahkan suara muslim pada masa itu agar memilih partai-partai Islam.⁴⁴

Kehadiran nuansa relasi kekuasaan–pengetahuan (*power–knowledge relation*) dalam penafsiran Hamka terhadap konsep *Ulū al-Amr* dapat dilihat dengan adanya relasi dominatif simbolik antara Hamka sebagai pihak yang turut ambil bagian dalam lingkaran kekuasaan legislatif (anggota konstituante dari Partai Masyumi) dengan masyarakat muslim Indonesia sebagai pihak pembaca tafsir sebagai objek kekuasaan dari pengetahuan Hamka dalam *Tafsir al-Azhar-nya*.⁴⁵

Dalam kaitannya dengan ideologi feminisme dan gender, tulisan *Alimatul Qibtiyah Feminisme Muslim di Indonesia* mengkategorisasi model nalar epistemologi feminisme yang ada di kalangan muslim Indonesia menjadi tiga, yaitu nalar feminisme tekstualis, nalar feminisme moderat serta feminisme progresif.⁴⁶ Tulisan ini mengelaborasi secara khusus nalar feminisme muslim Indonesia dengan menggunakan tiga parameter di atas, namun tidak melihat aspek maskulinitas sebagai perspektif kajian seperti yang dilakukan oleh penulis dalam disertasi ini.

Tulisan yang memiliki relevansi dan korelasi dengan isu gender dan kitab suci ditulis oleh Etin Anwar melalui dua karyanya, yaitu *Gender and Self in Islam*⁴⁷ serta *A Genealogy of Islamic Feminism:*

⁴⁴ Ulya, *Hubungan Kekuasaan – Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr QS an-Nisa [4]:59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955 1966* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 339-330.

⁴⁵ *Ibid.*, 339-330.

⁴⁶ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019).

⁴⁷ Etin Anwar, *Gender and Self in Islam* (USA & Canada: Routledge, 2006). Buku ini diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Mizan dengan Judul *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2017).

Pattern and Change in Indonesia.⁴⁸ Dalam dua karyanya, Etin Anwar menggunakan perspektif relasi kuasa dan teori gender untuk membaca akar dan asal usul munculnya politik seksualitas berupa perbedaan jenis kelamin sebagai dasar terjadinya hegemoni maskulinitas terhadap femininitas baik dalam wacana tafsir kitab suci. Lebih jauh Etin juga menjelaskan tentang asal-usul lahirnya pandangan penafsiran yang bias gender sebagai akibat dari pandangan yang seksis terhadap kitab suci.

Tinggal Purwanto dalam disertasinya *Wacana Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa – Pengetahuan dalam Tafsir al-Quran Tematik Kementerian Agama* membedah wacana tafsir tematik Kementerian Agama yang berkaitan dengan isu gender dan relasi kuasa. Ia mengemukakan argumentasi bahwa tafsir tematik Kementerian Agama RI memiliki konstruksi berkesetaraan gender, khususnya terkait ayat-ayat penciptaan manusia, relasi suami – istri dalam keluarga, maupun kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial dan publik. Lahirnya tafsir tematik bernuansa kesetaraan gender tersebut tidak terlepas dari relasi kuasa – pengetahuan di mana negara—melalui Kementerian Agama memproduksi wacana kesetaraan gender dalam beberapa volume buku tafsir al-Quran tematik.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, meskipun beberapa peneliti/ penulis telah melakukan riset terhadap produk al-Qur'an dan tafsir Kementerian Agama, namun secara spesifik belum ditemukan tulisan terkait seksualitas dan gender dengan menggunakan teori relasi kuasa dan teori gender (maskulinitas) dalam wacana seksualitas baik dalam genre tafsir tematik maupun tafsir ilmi.

⁴⁸ Etin Anwar, *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2020). Buku ini merupakan terjemah dari judul asli *A Genealogy of Islamic Feminism Pattern and Change in Indonesia*, (Routledge, 2018).

⁴⁹ Tinggal Purwanto, “Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia”, *Disertasi* pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Meskipun disertasi Tinggal Purwanto mempunyai keterkaitan dengan relasi kuasa dan kesetaraan gender dalam *Tafsir Tematik* Kementerian Agama, namun disertasi ini memiliki kesimpulan yang berbeda dengan temuan Tinggal Purwanto, bahkan pada sebagian hal membantah temuan dalam disertasinya tersebut. Distingsi lain dalam disertasi ini dibandingkan disertasi Tinggal Purwanto terletak pada aspek teori dan metode. Pada aspek teoritis, Tinggal Purwanto menggunakan teori relasi kuasa dan konstruksi kesetaraan gender untuk memotret *Tafsir Tematik* Kemenag, sedangkan penulis menggunakan teori konstruksi maskulinitas dan relasi kuasa untuk membuktikan asumsi dalam disertasi ini.⁵⁰ Selanjutnya, dari sisi objek dan sumber penelitian, Tinggal Purwanto hanya mengkaji wacana kesetaraan gender terkait relasi sosial laki-laki dan perempuan di ranah publik dan domestik dalam tiga seri *Tafsir al-Qur'an Tematik* (TAT) Kementerian Agama yaitu *Pemberdayaan Perempuan (jilid 1)*, *Kedudukan dan Peran Perempuan (jilid 3)*, serta *Perempuan dan Ketenagakerjaan (jilid 6)*, sedangkan disertasi ini dominan membahas aspek seksualitas-biologis seperti pernikahan, reproduksi, relasi seksual, orientasi dan hak-hak seksual, kekerasan seksual dan lain-lain dengan mengkaji sumber data yang lebih luas yakni sebanyak 12 volume/seri baik dalam *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi*.⁵¹

Perbedaan lain pada aspek metode adalah dalam hal pengumpulan data dengan metode wawancara. Jika sumber wawancara yang dilakukan oleh Tinggal Purwanto hanya terhadap dua penulis, yaitu Yuli Yasin, M.A., dan Prof. Dr. Muhammad, M.Ag., maka sumber wawancara dalam disertasi ini lebih banyak dan representatif yaitu sebanyak sembilan orang baik yang berstatus sebagai nara sumber, tim *mufasssir/mufasssirah* maupun Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ).

Tulisan Tinggal Purwanto meskipun menggunakan teori relasi kuasa dan pendekatan gender, namun obyek penelitiannya

⁵⁰ Tinggal Purwanto, "Kesetaraan Gender dan relas Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia", *Disertasi* pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, h. 15-43.

⁵¹ *Ibid.*, h. 43.

dikhususkan pada ayat-ayat gender, yakni relasi dan konstruksi sosial laki-laki dan perempuan, bukan pada ayat-ayat seksualitas yang lebih menekankan aspek biologi seksual, seperti orientasi seksual, hak-hak seksual, pernikahan. Dengan demikian, riset penulis baik sisi teoretik, metode dan temuan (*novelty*) memiliki perbedaan dengan Tinggal Purwano, bahkan akan membantah sebagian temuannya tersebut.

F. Kerangka Teoretik

Kajian dalam penelitian disertasi ini akan mengungkap dan menjelaskan konstruksi maskulinitas hegemonik dan relasi kuasa pengetahuan (*power relation*) yang terbangun dalam wacana seksualitas pada *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama. Karya tafsir tersebut ditulis melalui penulisan kolektif (tim tafsir/penyusun) oleh institusi negara, melalui Lembaga Teknis yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Untuk membuktikan asumsi penulis terkait kentalnya nuansa maskulinitas dalam kedua genre tafsir tersebut, khususnya terkait wacana seksualitas, penulis menggunakan teori maskulinitas dan kitab suci yang dipadu dengan teori relasi kuasa–pengetahuan Michael Foucault. Penggunaan teori maskulinitas dalam disertasi ini menjadi pilihan yang tepat sebagai alat untuk menghasilkan temuan dan kebaruan riset, ditambah dengan analisis relasi kuasa sebagai alat untuk membongkar otoritas dan kuasa negara melalui otoritas teks tafsir al-Qur'an.

1. Konsep Seksualitas

Seks (*sex*) adalah sebuah konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis. Sedangkan seksualitas adalah semua hal yang berkaitan dengan organ seks, reproduksi, erotisme, orientasi seksual, identitas seksual, identitas dan peran gender, kemesraan, dan kenikmatan.⁵² Sebagai sesuatu yang bersifat biologis, istilah seks dipandang sebagai

⁵² Lihat Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), 8-11.

hal yang stabil, merujuk pada alat kelamin laki-laki dan perempuan serta tindakan penggunaannya secara seksual. Jika seks adalah sebuah konsep tentang perbedaan dan pembedaan jenis kelamin berdasarkan aspek hormonal, biologis dan patologis yang bersifat stabil dan natural (*given*),⁵³ maka seksualitas yang di dalamnya tercakup aspek gender merupakan sebuah proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau berahi manusia.⁵⁴ Namun demikian, seksualitas tidak semata-mata berkaitan dengan aspek organ seksual biologis, tetapi juga mencakup spektrum fisik biologis, struktur anatomi tubuh serta unsur psikologis (rohani) manusia.⁵⁵

Michael Foucault, John Gagnon dan William Simon menjelaskan perbedaan seks dan seksualitas, bahwa pemaknaan seksualitas tercipta atau terkonstruksi secara sosial, bersifat *fluid* (cair) serta dinamis, bukan sesuatu yang baku dan fitrah seperti dalam pemaknaan essentialisme.⁵⁶

Seksualitas memiliki cakupan definisi yang lebih kompleks dan luas tidak hanya terkait dengan seks, tetapi juga dengan gender dan relasi kuasa. Jika seks hanya terkait dengan aspek anatomi fisik biologis yang bersifat natural atau *taken for granted*, maka seksualitas mencakup tidak hanya aspek seksual tetapi juga persoalan gender dan kompleksitas dari keduanya yang mencakup aspek norma, pengetahuan serta perilaku yang berkaitan dengan seksualitas seseorang atau masyarakat. Berbeda dengan seks yang dianggap bersifat *given* atau biologis, seksualitas merupakan konstruksi sosial

⁵³ AD Kusumaningtyas. dkk, *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-agama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 8-11.

⁵⁴ Lihat Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam ...*, 8-11.

⁵⁵ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015), viii-ix.

⁵⁶ Jane Pilcher dan Ilmelda Whelehan, *50 Key Concepts in Gender Studies*, (London: SAGE Publications Ltd:2004), 155-156.

terhadap entitas seks yang mengatur fungsi dan perilaku tubuh (*bodily functions*).⁵⁷

Seksualitas mencakup norma atau nilai serta aturan-aturan yang memberikan status dan peran yang membatasi dan mengatur perilaku/tindakan yang berkaitan dengan seks.⁵⁸ Ada tiga aspek yang menjadi cakupan seksualitas, yaitu pengetahuan, norma yang mengatur perilaku seksual, serta aspek perilaku.⁵⁹

Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spiritualitas. Terdapat perbedaan substansial antara seks dan seksualitas, di mana seks adalah sesuatu yang bersifat biologis, *given* atau terberi/anugerah dan karena dianggap sebagai sesuatu yang stabil. Sementara seksualitas merupakan konstruksi sosial budaya.⁶⁰ Meskipun seks dan seksualitas adalah dua hal yang berbeda, istilah seks seringkali digunakan untuk menjelaskan kedua hal tersebut. Misalnya, kata seks digunakan untuk menjelaskan kebiasaan atau praktik seksual.⁶¹

Seksualitas merupakan sebuah proses dan konstruksi sosial yang mengekspresikan hasrat erotik dan birahi yang melibatkan banyak aspek, seperti sosial, politik, budaya sampai ajaran agama.⁶² Dalam banyak agama dan budaya, wacana seksualitas juga sering dihubungkan dengan konstruksi kelamin sosial atau gender yang menjelaskan relasi laki-laki dan perempuan.⁶³ Dalam perspektif post

⁵⁷ Michael Foucault, *The Use of Pleasure: Volume 2 of the History of Sexuality* (New York: Vintage Books, 1990), 4. Juga Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, (Yogyakarta: Larassukma, 2019), 36-37.

⁵⁸ Irwan M. Hidayana, dkk, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, (Jakarta: FISIP UI, 2004), 46.

⁵⁹ Yulfita Raharjo, "Seksualitas Manusia dan Masalah Gender" dalam Abdurrahman Wahid dkk., *Seksualitas, Kesetaraan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 221.

⁶⁰ Lihat Husein Muhammad. dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam ...*, 8-11.

⁶¹ AD Kusumaningtyas. dkk, *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi...*, 8-11.

⁶² Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas...*, viii-ix.

⁶³ Husein Muhammad. dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam...*, 8-11.

strukturalisme, seksualitas merupakan konstruksi sosial tentang pengetahuan, perilaku, norma serta subyektifitas yang berkaitan dengan seks dan sistem kuasa pengetahuan.⁶⁴

Adapun konsep seksualitas yang dimaksud dalam kajian disertasi ini mencakup wacana dalam TTKA dan TIKa yang berkaitan dengan organ seks, reproduksi, erotisisme, orientasi seksual, identitas seksual, identitas dan peran gender, erotisisme yang akan dijelaskan dengan menggunakan analisis gender yaitu teori maskulinitas hegemonik (*hegemonic masculinity*).

2. Konstruksi Maskulinitas

Kajian disertasi ini menggunakan analisis gender dengan menggunakan teori *hegemonic masculinity* difokuskan pada wacana atau topik seksualitas dalam *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kasus yang sangat dominan pada kedua genre tafsir tersebut, konstruksi gender khususnya tentang maskulinitas laki-laki yang hegemonik terbentuk melalui cara pandang hierarkis yang menekankan konstruksi maskulinitas berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Wacana seksualitas dalam kajian ini difokuskan pada isu pernikahan, kesehatan reproduksi, serta hak-hak dan orientasi seksual dengan berbagai *sub-chapter*.

Maskulin dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti “bersifat jantan”, “jenis laki-laki”, sebagai antonim dari kata “feminin” yang berarti “bersifat kewanitaan”. Sedangkan kata maskulinitas berarti “kejantanan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan kualitas seksualnya”.⁶⁵ Di dalam *50 Key Concepts in Gender Studies*, konsep maskulinitas dijelaskan sebagai “seperangkat praktik sosial dan representasi budaya yang diasosiasikan/dikaitkan dengan menjadi seorang pria”. Penggunaan istilah *masculinities* dengan menggunakan bentuk jamak (plural) merupakan sebuah bentuk pengakuan untuk

⁶⁴ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas*, 36-37.

⁶⁵ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008), 410,933. Lihat juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/maskulin>.

menjadi laki-laki (*masculine*) dalam representasi budaya bersifat beragam alias tidak tunggal baik secara historis maupun kultural di antara beragam budaya, kelompok laki-laki yang berbeda dalam satu masyarakat.⁶⁶

Definisi maskulinitas merujuk pada peran sosial, perilaku, dan makna yang ditentukan bagi laki-laki dalam sosial masyarakat tertentu pada masa tertentu. Dengan demikian, istilah tersebut lebih menekankan pada aspek atau sisi gender (peran atau identitas sosial), bukan pada aspek seksual biologis atau jenis kelamin, dan keragaman identitas di antara berbagai kelompok laki-laki. Meskipun identitas gender dialami sebagai aspek internal identitas, namun maskulinitas atau identitas diproduksi dalam institusi kemasyarakatan melalui interaksi sosial sehari-hari.⁶⁷

Kajian disertasi ini menggunakan analisis gender yaitu teori *hegemonic masculinity* (maskulinitas hegemoni) yang dipopulerkan oleh R.W. Connell. Menurut Connell untuk menjelaskan konstruksi maskulinitas yang bekerja dalam wacana seksualitas pada TTKA dan TIKa, konsep maskulinitas hegemonik pertama kali digunakan untuk melihat fenomena ketidaksetaraan sosial dan gender yang terjadi pada SMA di Australia terkait hegemoni siswa laki-laki yang membuat konstruksi tentang hegemoni maskulinitas laki-laki.⁶⁸

Merujuk Connell, maskulinitas hegemonik (*hegemonic masculinity*), Hegemoni maskulinitas didefinisikan sebagai praktik

⁶⁶ Jane Pilcher dan Ilmelda Whelehan, *50 Key Concepts in Gender Studies*, (London: SAGE Publications Ltd:2004), 82-83.

⁶⁷ Michael Kimmel and Amy Aronson (ed.), *Men and Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia*, (Santa Barbara, California: ABC CLIO Inc., 2004), 503.

⁶⁸ Istilah hegemoni dalam teori maskulinitas hegemonik dipinjam oleh R.W. Connell dari Antonio Gramsci untuk berargumen pada 1980-an bahwa dalam perjuangan beragam maskulinitas untuk kekuasaan, satu jenis (atau model) diidealkan, sehingga menjadi hegemonik, dengan kata lain, dominan dan normatif. Maskulinitas hegemonik ini, 'cara yang paling dihormati saat ini untuk menjadi seorang pria', memaksa 'semua pria lain untuk memposisikan diri mereka dalam kaitannya dengan itu, dan secara ideologis itu sah. Lihat R.W. Connell, James W. Messerschmidt, *Hegemonic Masculinity Rethinking the Concept*, dalam *Gender & Society*, Vol. 19 No.06, December 2005, 829-830.

yang melegitimasi posisi dominan laki-laki dalam masyarakat dan membenarkan subordinasi populasi laki-laki dan perempuan yang umum, dan cara-cara terpinggirkan lainnya untuk menjadi seorang pria. Istilah ini merupakan kerangka konseptual yang biasa digunakan untuk mengekspresikan hubungan gender dominasi dan subordinasi, mengacu pada konfigurasi praktik gender yang mewujudkan jawaban yang diterima saat ini untuk masalah legitimasi patriarki, yang menjamin (atau dianggap menjamin) dan yang mendominasi kedudukan laki-laki dan subordinasi perempuan.⁶⁹ Secara empirik, maskulinitas tidak bersifat tunggal, tetapi beragam (*multiple masculinities*) dan bersifat sangat cair.⁷⁰ Secara praktik, hegemoni maskulinitas terdiri dari beragam praktik yang memungkinkan dalam upaya mempertahankan status dan kekuasaan laki-laki atas perempuan secara kolektif (dimensi eksternal) dan atau hegemoni sekelompok laki-laki atas laki-laki lainnya (dimensi internal).⁷¹

Terkait definisi dan konsep maskulinitas, Connell menyebutkan maskulinitas bukanlah objek yang koheren yang selalu dapat menghasilkan ilmu yang bersifat general. Tetapi tidak berarti bahwa tidak ada definisi yang dapat dilekatkan dalam sifat maskulinitas yang senantiasa dinamis tersebut. 'Maskulinitas', sejauh istilah tersebut dapat didefinisikan secara singkat, secara bersamaan merupakan tempat dalam hubungan gender, praktik di mana pria dan wanita terlibat dalam gender, dan efek dari praktik ini dalam pengalaman tubuh, kepribadian, dan budaya.

Salah satu topik yang mulai menjadi fokus studi maskulinitas adalah keragaman maskulinitas yang ada. Sebagai akibatnya, segala macam performansi maskulinitas dan hubungan berikutnya dengan (semua jenis) perempuan dan jenis gender lainnya yang termasuk

⁶⁹ R.W. Connell, *Masculinities: Second Edition* (Berkeley Los Angeles, University of California Press: 2005), 77. Lihat juga William A. Darity Jr., (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition* (USA, The Gale Group: 2008), 7.

⁷⁰ Jane Pilcher dan Ilmelda Whelehan, *50 Key Concepts in Gender Studies...*, 84.

⁷¹ William A. Darity Jr., (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition* (USA, The Gale Group: 2008), 7.

dalam lingkungannya. Maskulinitas secara bersama (kolektif) ditentukan oleh berbagai faktor, mulai dari fisik (usia, kebugaran, kecacatan, impotensi, orientasi seksual dalam berbagai konstruksi budayanya) sampai penentuan yang lebih bersifat sosial dan budaya, tetapi tidak terbatas hanya kepada etnis, keyakinan agama atau pandangan dunia, status ekonomi, status politik, dan lain-lain.⁷²

Menurut R.W. Connell, gender merupakan sebuah produk akhir dari interpretasi dan definisi berkelanjutan yang ditempatkan pada kapasitas reproduksi dan seksual tubuh manusia. Maskulinitas dapat dipahami sebagai efek dari interpretasi dan definisi ini pada tubuh, kepribadian, dan pada budaya dan institusi masyarakat.⁷³

Di dalam struktur *gender order* yang bersifat hierarkis, sejak akhir abad XIX di Eropa dan Amerika Utara, tipe maskulinitas hegemonik sesungguhnya telah eksis dan bersifat stabil baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial sebagai bentuk yang menghegemoni bentuk gender lainnya khususnya femininitas.⁷⁴

Dalam kajiannya yang terbaru, Connell menegaskan maskulinitas tidak hanya setara dengan laki-laki biologis. Dengan kata lain, tubuh, perilaku, atau sikap maskulin dapat menjadi praktik sosial orang-orang yang didefinisikan sebagai perempuan. Maskulinitas adalah konsep yang menyebutkan pola praktik gender, bukan hanya merujuk sekelompok orang⁷⁵

Para sarjana/peneliti maskulinitas membahas laki-laki dan maskulinitas sebagai konstruksi sosial. Alih-alih berfokus pada aspek universal biologis, ilmuwan sosial dan perilaku meneliti makna berbeda yang dimiliki maskulinitas dan femininitas dalam konteks (situasi dan kondisi) yang berbeda. Saat kejantanan biologis memiliki sangat sedikit variasi, maka peran, perilaku, tubuh, dan identitas yang

⁷² Peter-Ben Smit, "Masculinity and the Bible dalam *Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation 2.1* (2017) 1-97, 4-5.

⁷³ Jane Pilcher dan Ilmelda Whelehan, *50 Key Concepts in Gender...*, 83.

⁷⁴ R.W. Connell, *Masculinities: Second Edition*, (Berkeley Los Angeles, University California Press: 2005), 189.

⁷⁵ R.W. Connell, *The Men and The Boys* (Australia, Allen and Unwin: 2005)189, lihat juga Jane Pilcher dan Ilmelda Whelehan, *50 Key Concepts in Gender...*, 84.

dianggap sebagai maskulin justru sangat bervariasi. Variasi ini memungkinkan para sarjana untuk berpendapat bahwa maskulinitas dikonstruksi secara sosial. Sarjana maskulinitas menggambarkan berbagai tingkat variasi dalam maskulinitas. Pertama, maskulinitas bervariasi secara historis, yaitu apa yang dianggap sebagai maskulin berubah dari waktu ke waktu. Kedua, maskulinitas bervariasi lintas budaya, konseptualisasi maskulinitas bersifat spesifik secara budaya. Ketiga, maskulinitas bervariasi secara intra-psikis—apa artinya menjadi seorang pria berubah sepanjang hidup seseorang. Terakhir, maskulinitas bervariasi secara kontekstual, bahkan dalam masyarakat dan periode waktu tertentu maskulinitas dapat memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Sederhananya, tidak semua pria Amerika, Nigeria, Cina atau Australia adalah sama. Lebih khusus lagi, 'menjadi seorang laki-laki' berarti sesuatu yang sangat berbeda dengan anak laki-laki heteroseksual usia kuliah, kulit putih, yang tinggal di Maine dibandingkan dengan pria paruh baya, homoseksual, Latin yang tinggal di San Francisco. Karena maskulinitas sangat bervariasi, kita tidak dapat berbicara tentang 'itu' seolah-olah hal itu adalah esensi abadi yang umum di antara semua pria. Sebaliknya, kita harus berbicara tentang maskulinitas justru karena maskulinitas berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda dalam budaya yang berbeda dan dalam periode sejarah yang berbeda. Studi tentang laki-laki dan maskulinitas mengambil dari studi feminis tentang perempuan dan gender dan berusaha untuk mengidentifikasi konstruksi sosial gender serta menjelaskan cara laki-laki memainkan peran dalam gender dan ketidaksetaraan seksual.⁷⁶

Terkait dengan studi maskulinitas dalam teks kitab suci agama-agama, studi maskulinitas Bibel adalah kajian tentang representasi gender laki-laki (baik pada laki-laki maupun perempuan, termasuk Tuhan “laki-laki”) dalam Bibel dan literatur terkait.

Terdapat relasi yang saling berkait kelindan antara kekuasaan, pengetahuan agama dan praktik-praktik kultural dalam

⁷⁶ Peter-Ben Smit, “Masculinity and the Bible dalam *Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation 2.1* (2017) 1-97, 5-6.

mengkonstruksi maskulinitas dan femininitas serta efeknya terhadap pembentukan jati diri material. Menurut Etin Anwar dalam karyanya *Gender and Self in Islam*, penggambaran diri melalui *intelligibility* budaya (norma-norma budaya yang diresepsi sebagai standar norma/kebenaran), fatwa agama, narasi agama serta legitimasi otoritatif ikut mendorong perkembangan unsur-unsur pembentukan jati diri material secara gradual mengendap dan mengkonstruksi sebuah model jati diri material yang mengandung kebakuan rupa fisik dan sistem moralitas berbasis femininitas dan maskulinitas. Pada tahap selanjutnya, konstruksi gender yang populer tersebut, baik femininitas maupun maskulinitas, menyebar melalui beragam kuasa institusi sosial, norma, sistem hukum dan kebudayaan lokal yang secara kontinyu membantu melestarikan sistem patriarki di dalam komunitas muslim.⁷⁷

Etin menegaskan, proses femininitas dan maskulinitas dalam kehidupan muslim merupakan proyek seumur hidup yang dilancarkan oleh para sarjana hukum, pendakwah (da'i), serta para sufi melalui media keagamaan, sastra, serta dakwah yang menekankan ekspektasi-ekspektasi maskulin terhadap femininitas yang tepat.⁷⁸

Menurut Riffat Hassan, konsep femininitas tersebut berakar dari penafsiran terhadap sumber teks Islam yang dilakukan oleh kelompok laki-laki muslim yang mengklaim memiliki otoritas mendefinisikan status ontologis, sosiologis, dan eskatologis perempuan muslim yang disandarkan pada pola berpikir gender hierarkis atau *gender thinking* (pola pikir gender).⁷⁹

Dengan pola pikir tersebut, menurut Etin, teks al-Qur'an dan hadis digunakan untuk menjustifikasi unsur-unsur yang berbeda

⁷⁷ Etin Anwar, *Gender and Self in Islam* (London and New York: Routledge: 2006), 94. Edisi Bahasa Inggris ini telah diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 2017 oleh Mizan. Silahkan lihat juga Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan:2017), 208.

⁷⁸ *Ibid.*, Etin Anwar, 208-209.

⁷⁹ Etin Anwar, *Gender and Self in Islam* (London and New York: Routledge:2006), 94. Edisi Bahasa Inggris ini telah diterjemahkan dan diterbitkan pada tahun 2017 oleh Mizan. Silahkan lihat juga Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan:2017), 208.

dalam membentuk jati diri material baik yang maskulin maupun feminin, bukannya kesamaan diri sebagai manusia yang saling melengkapi. Pengejawantahan narasi dan pernyataan religius dalam al-Qur'an dan hadis berjalan beriringan dengan konsep dikotomik jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang memiliki landasan teologis, yaitu bahwa manusia terdiri atas makhluk laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, faktor yang menentukan bentuk jati diri material adalah penciptaan dan pembedaan jenis kelamin sebagai tempat pengejawantahan perilaku, karakteristik, sikap dan moralitas yang diasosiasikan dengan jenis kelamin masing-masing.⁸⁰

Konsep dalam ilmu sosial muncul sebagai respon terhadap masalah intelektual dan praktis tertentu serta dirumuskan dalam bahasa dan gaya intelektual tertentu. Tetapi konsep tersebut juga memiliki kapasitas untuk melangkah jauh untuk memperoleh makna baru. Hal ini juga menurut Connell terjadi dengan konsep hegemoni maskulinitas (*hegemonic masculinity*), yang telah diambil di bidang mulai dari pendidikan dan psikoterapi hingga pencegahan kekerasan dan hubungan internasional. Sebagai formulasi teoretis yang menemukan penerapan dalam pengaturan dan tangan yang berbeda, konsep *hegemonic masculinity* sangat mungkin berpindah dan berubah dan mungkin bermutasi ke arah yang berbeda di lingkungan yang berbeda. Dengan kata lain, konsep *hegemonic masculinity* bersifat dinamis dan plural, dapat berubah tergantung konteks, situasi dan kondisi. Connell menegaskan dengan adanya modifikasi pada konsep *hegemonic masculinity* akan memberikan kontribusi untuk memahami dinamika dalam relasi gender.⁸¹

Teori Connell juga menyatakan konseptualisasi *hegemonic masculinity* membuka ruang terbentuknya tidak hanya memproduksi relasi gender yang hierarkis, namun juga kemungkinan relasi gender yang lebih setara dan demokratis yang menghapus perbedaan kuasa. Dalam pengertian ini, menurut Connell, sangatlah mungkin membuat

⁸⁰ Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, 208-209.

⁸¹ R.W. Connell, James W. Messerschmidt, *Hegemonic Masculinity Rethinking ...*, 853.

sebuah definisi maskulinitas hegemonik yang bersifat positif, bukan yang patriarkis (negatif).⁸²

Berdasarkan konsep dan teori *hegemonic masculinity* yang diperkenalkan oleh RW Connell tersebut, penulis menawarkan konsep dan istilah baru untuk menjelaskan konstruksi maskulinitas hegemoni dalam wacana seksualitas pada *TTKA* dan *TIKA*. Konsep baru itu disebut *Patriarchic Hegemonic Masculinity* (maskulinitas hegemonik patriarkis). Konsep tersebut dapat menghasilkan tiga kategori yang juga secara teoritik memberi melahirkan kategori turunan.

Patriarki merupakan suatu sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. S. Walby mengidentifikasi ada enam struktur patriarki, yaitu produksi rumah tangga, pekerjaan yang dibayar, negara, kekerasan laki-laki, seksualitas, budaya, yang secara bersama-sama diargumentasikan untuk menangkap kedalaman, keluasan, dan keterpaduan subordinasi perempuan. Maskulinitas patriarki adalah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan gagasan dan praktik maskulinitas yang menekankan superioritas maskulinitas atas feminitas dan otoritas laki-laki atas perempuan. Dalam perkembangannya, konsep patriarkis, seperti yang dielaborasi oleh Walby dalam kasus di Inggris mengalami pergeseran dan perubahan. Tidak hanya terjadi dalam wilayah privat dan domestic (rumah tangga) tetapi juga ke wilayah sosial dan public.⁸³

Kategori pertama disebut maskulinitas patriarkis aktif (*active patriarchal masculinity*) dalam konteks *TTKA* dan *TIKA*, yaitu ketika representasi maskulinitas hadir secara dominan dalam wacana tafsir tersebut dengan menonjolkan aspek patriarkis secara eksplisit. Pada saat yang sama, aspek femininitas tidak muncul atau hanya hadir dalam porsi wacana yang minim dan secara hierarkis berada dalam hegemonik patriarkis. Kategori kedua, maskulinitas hegemonik pasif (*passive hegemonic masculinity*) adalah ketika representasi

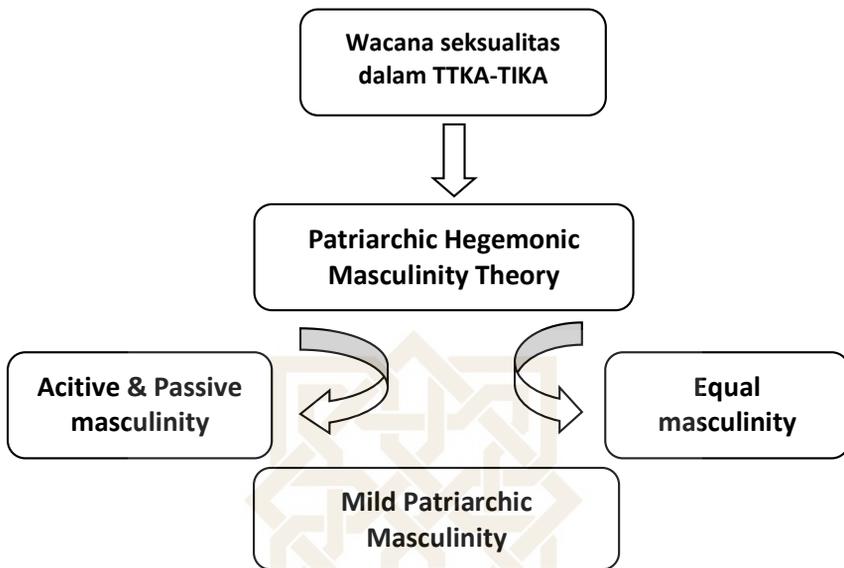
⁸² *Ibid.*, 853.

⁸³ Jane Pilcher dan Ilmelda Whelehan, *50 Key Concepts in Gender Studies...*, 95.

femininitas disebut atau diuraikan secara luas, sementara maskulinitas hegemonik tidak hadir atau hanya muncul dalam proporsi yang sangat minim dalam wacana *TTKA* dan *TIKA*, akan tetapi kehadiran femininitas tersebut justru hanya menguraikan sisi inferioritas perempuan yang secara implisit justru tetap meneguhkan maskulinitas hegemonik yang patriarkis. Kategori maskulinitas hegemonik aktif dan pasif ini masih dapat melahirkan dua kemungkinan model yaitu yang bersifat kuat (*strong*) dan bersifat lunak (*mild*).

Sedangkan kategori ketiga disebut maskulinitas hegemonik yang setara (*equal hegemonic masculinity*) ketika representasi maskulinitas dan femininitas hadir dalam proporsi yang seimbang dalam wacana *TTKA* dan *TIKA*, sehingga hubungannya bersifat berkesetaraan (*equality*), namun perspektif kesetaraan itu tetap dalam perspektif logika dan cara pandang dunia maskulinitas patriarkis. Secara teoretik, dua kategori di atas baik aktif-pasif maupun setara dapat melahirkan dua model. Pertama, adalah maskulinitas hegemonik setara yang keras (*strong equal hegemonic masculinity*) yaitu ketika wacana penafsiran secara keseluruhan benar-benar berkesetaraan (non-hierarkis). Kedua, adalah maskulinitas hegemonik setara yang lunak (*mild equal hegemonic masculinity*) yaitu ketika dalam wacana atau isu tertentu penafsirannya masih bersifat hierarkis.

Kedua model konstruksi maskulinitas hegemonik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



3. Teori Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Wacana Tafsir

Untuk mengungkap aspek relasi kuasa yang bekerja dalam pengetahuan, dalam hal ini Tafsir al-Qur'an Tematik dan Tafsir Ilmi Kementerian Agama, penulis menggunakan teori relasi kuasa Michael Foucault. Teori otoritas kekuasaan digunakan untuk mengungkap model otoritas pengarang yaitu para penafsir dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan produk al-Qur'an dan tafsir di lingkungan Kementerian Agama. Hal ini menyangkut proses terbentuk, cara bekerja (penyusunan) yang mengarahkan pemikiran dan perilaku para pembacanya agar berperilaku selaras dengan pesan-pesan dalam produk tafsir tersebut. Jika merujuk kepada pandangan Khaled Abou el Fadl, otoritas yang melekat pada seseorang dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif. Sebagai penerjemah dan penafsir ayat-ayat Tuhan, para mufasir memegang otoritas yang mampu mengarahkan pikiran dan kehendak

pembaca untuk bertindak sesuai yang diinginkan para mufasir tersebut.⁸⁴

Sedangkan teori relasi kuasa–pengetahuan (*power–knowledge*) model Michael Foucault digunakan dalam upaya mengungkap adanya relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan. Pada konteks ini, Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai representasi negara yang memangku otoritas urusan keagamaan (*religious authority*) melimpahkan otoritas dan kuasa kepada para tim mufasir yang tergabung dalam Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an (LPMQ) untuk mengoperasionalkan kekuasaan (*power*) yang menyebar dan beroperasi dalam berbagai bentuk secara sistematis dan terintegralistik untuk mengarahkan perilaku dan pemikiran masyarakat di Indonesia melalui wacana tafsir seks dan seksualitas yang diproduksi.⁸⁵

Adanya hubungan dominasi yang tak disadari dari pihak pembuat wacana atas pihak pembaca justru melahirkan persoalan kekuasaan perspektif Foucault. Foucault mendefinisikan kekuasaan sebagai berikut:

menurut saya, kekuasaan harus dipahami yang pertama sebagai berbagi hubungan kekuatan yang imanen di manapun hubungan itu berada dan yang menetapkan peraturan mereka sendiri, sebagai sebuah proses yang dilalui tanpa perebutan dan konfrontasi, mengubah, menguatkan atau menguatkan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut: dalam hubungan-hubungan kekuatan tersebut saling mendukung kemudian membentuk sebuah rangkaian ataupun sebuah sistem, atau sebaliknya yakni berpisah dan berlawanan sehingga akan mengisolasi mereka dari yang lain: dan akhirnya menjadi strategi-strategi yang mempengaruhi, yang memiliki pola umum atau perwujudan institusional yang dilembagakan pada aparatur negara, dalam pembentukan hukum, serta hegemoni sosial yang seragam.⁸⁶

⁸⁴ Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: Oneword Publication, 2001), 18.

⁸⁵ Michael Foucault, *The History of Sexuality*, Vol I, an Introduction (New York: Vintage Books, 1990), 92-93.

⁸⁶ Michael Foucault, *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, trans. Robert Hurley (New York: Vintage Book, 1990), 92-93.

Menurut Foucault, sebagaimana yang juga dikutip oleh Haryatmoko, kekuasaan haruslah dipahami dari berbagai macam hubungan kekuatan yang melekat pada bidang hubungan-hubungan tersebut berikut organisasinya. Permainannya akan mengubah, memperkuat, atau membalikkan hubungan-hubungan itu melalui perjuangan dan pertarungan terus menerus. Ciri-cirinya tidak dapat dilokalisasi, tidak represif tetapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui. Kekuasaan merupakan strategi yang kompleks dalam suatu masyarakat dengan perlengkapan, manuver, teknik dan mekanisme tertentu.⁸⁷

Ada dua gagasan dalam metodologi Foucault, yaitu arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan. Dua metode inilah yang sebenarnya digunakan Foucault untuk mengungkap persekutuan antara kekuasaan dan pengetahuan. Melalui metode genealogis, akan dapat terungkap bahwa kebenaran yang berwujud dalam bentuk objektivitas ilmu hanyalah ilusi belaka. Metode yang sama memperlihatkan bahwasanya kehendak untuk tahu menjadi proses dominasi terhadap manusia. Setiap pengetahuan terkait dengan objek kekuasaan: orang gila, kriminal, anak remaja, orang sakit, buruh, dan lainnya. Kaitannya terletak pada kemampuan pengetahuan mendefinisikan realitas objek tersebut. Dengan mendefinisikan realitas, pengetahuan mengubah konstelasi sosial. Sementara dengan metode arkeologis, Michael Foucault menemukan fakta bahwasanya seluruh wacana yang memiliki potensi objektivitas ilmu merupakan wacana seseorang yang memiliki kekuasaan. Dengan kata lain, arkeologi adalah pencarian atas sistem umum formasi dan transformasi pernyataan menjadi formasi diskursif.⁸⁸

Foucault mendeskripsikan kekuasaan dapat beroperasi melalui lima cara; *Pertama*, kekuasaan itu tidak didapat, dibagi atau diambil, tetapi ia bekerja dari berbagai titik, dalam permainan relasional yang

⁸⁷ Haryatmoko, "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekerasan", *Jurnal Basis* 51, No. 01-02. (Januari-Februari 2002), hlm. 11-12.

⁸⁸ Suharnadji, "Arkeologi Pengetahuan Michael Foucault", dalam *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, ed. Bagong Suyanto, dkk., (Yogyakarta: Aditya Media, 2010), hlm. 381.

tidak setara serta bersifat dinamis. *Kedua*, kekuasaan bersifat cair sebab ada perbedaan terbuka hubungan kekuasaan. Selanjutnya ditegaskan bahwa kekuasaan bersifat imanen, artinya hubungan kekuasaan adalah pengaruh dari pembagian, perbedaan, ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan. *Ketiga*, hubungan kekuasaan tidak dalam posisi suprastruktur, tetapi kekuasaan datang dari bawah. *Keempat*, hubungan kekuasaan itu intensional. *Kelima*, di mana ada afirmasi kekuasaan, di situ ada resistensi.⁸⁹

Harrold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi definisi kekuasaan sebagai berikut: “*Power is a relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of the former’s own ends.* (kekuasaan adalah sebuah relasi ketika seseorang atau kelompok orang mampu menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama/mengarahkan seseorang untuk mengikuti arahnya).⁹⁰

Konsep kekuasaan bagi Foucault bukan sekedar mewujud dalam bentuk institusi, tapi kekuasaan tersebut menyebar dan berada di mana-mana, dalam segala kondisi, aktivitas dan mobilitas, seperti diungkapkannya sebagai berikut:

Power is everywhere; not because it embraces everything, but because it comes from everywhere. And "Power," insofar as it is permanent, repetitious, inert, and self-reproducing, is simply the over-all effect that emerges from all these mobilities, the concatenation that rests on each of them and seeks in turn to arrest their movement. One needs to be nominalistic, no doubt: power is not an institution, and not a structure; neither is it a certain strength we are endowed with; it is the name that one attributes to a complex strategical situation in a particular society.

(Kekuasaan itu berada di mana-mana, bukan karena ia meliputi secara keseluruhan, tetapi karena kekuasaan memang muncul

⁸⁹ Michael Foucault, *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, trans. Robert Hurley, 94-95.

⁹⁰ Harrold D Laswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society* (New Haven: Yale University Press, 1959), 74.

dari semua arah. Hal yang permanen itu adalah kekuasaan, karena ia senantiasa berulang, beku, memproduksi dirinya dalam bentuk kekuasaan yang lain, serta muncul dari semua mobilitas tersebut. Kekuasaan juga sebuah perangkaian yang berlandaskan pada setiap mobilitas dan sebaliknya, selalu berusaha menahan mereka. Sikap seseorang yang paling baik adalah nominalistik: kekuasaan bukanlah sekedar sebuah institusi/lembaga, dan bukan pula sebuah struktur, bukan pula semacam kekuatan tertentu yang terdapat pada beberapa orang. Kekuasaan adalah sebuah nama yang disematkan kepada situasi strategis yang bersifat kompleks dalam sebuah persoalan tertentu).⁹¹

Dengan demikian, kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak hanya bersifat monolitik, tunggal dan tersentralisasi hanya pada satu institusi atau individu, tetapi terdesentralisasi dan menyebar di mana-mana dalam berbagai bentuk formalisasi relasi sosial, seperti rumah sakit, tempat pendidikan, penjara, klinik, organisasi bahkan hingga aspek seksualitas.

Relasi kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan yang ada dalam proses relasi ekonomi, politik, seksual maupun diseminasi pengetahuan. Kekuasaan merupakan dampak langsung dari adanya disparitas, jarak atau keterpisahan. Ia hadir pada saat ada ketidaksetaraan (*disparity*) atau ketidaksederajatan (*equality*), sehingga mendorong terjadinya diskriminasi. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan situasi internal yang disebabkan adanya perbedaan yang melahirkan diskriminasi. Perbedaan tersebut terwujud dan berlangsung di dalam keluarga, institusi, tempat bekerja dan berbagai pengelompokan.⁹²

Hubungan kekuasaan yang beragam tersebut secara parsial dapat dikodifikasi namun tidak pernah mungkin secara menyeluruh, baik dalam bentuk politik ataupun peperangan; maka akan ada dua strategi berbeda (tetapi mudah beralih dari yang satu ke yang lain) untuk mengintegrasikan reasi-relasi kekuatan itu, yang tak seimbang,

⁹¹ Foucault, *History*, 93.

⁹² Haryatmoko, *Etika Politik*, 240-241.

heterogen, tidak stabil dan tegang. Dengan demikian, dapat dikemukakan beberapa proposisi:

- a. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat (*acquired*), diambil secara paksa (*seized*) atau dibagi (*shared*), sesuatu yang dipegang (*hold*) atau dibiarkan begitu saja (*slip away*); kekuasaan bekerja berdasarkan pada elemen-elemen yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam permainan (*interplay*) hubungan yang tidak egaliter (*nonegalitarian*) dan bergerak (*mobile relation*).
- b. Bahwa hubungan-hubungan kekuasaan tidak berada pada posisi luar terhadap tipe-tipe hubungan lain (proses ekonomis [*economic process*], relasi pengetahuan [*knowledge relationship*], hubungan seksual [*sexual relation*]), tetapi hubungan-hubungan itu imanen di dalamnya sebagai efek langsung dari pembagian (*immediate effects of divisions*), ketidaksederajatan dan ketimpangan di dalamnya, dan saling mensyaratkan *intern* dalam sebagai perbedaan tersebut.
- c. Kekuasaan muncul dari bawah (*capillary*). Artinya kekuasaan tidak punya standar suatu oposisi biner (*binary*) dan semua arah (*all-encompassing*) antara pendominasi (*rulers*) dan yang didominasi (*ruled at the root of power relations*) dan melayani sebagai matriks yang bersifat general (*serving as a general matrix*). Sebaliknya, kekuasaan itu adalah hubungan kekuatan yang terbentuk dan berfungsi dalam perangkat produksi, keluarga, kelompok terbatas, lembaga, digunakan sebagai landasan perbedaan-perbedaan yang berdampak luas dan memasuki relung-relung masyarakat. Perbedaan-perbedaan itu membentuk suatu garis merah yang memasuki berbagai pertentangan lokal, dan mengaitkannya kembali; pada gilirannya, semua itu menghasilkan distribusi ulang, penyetaraan, homogenisasi, penataan deret, pengkonvergensi. Dominasi-dominasi adalah efek hegemonis yang dihasilkan secara berkelanjutan oleh berbagai macam pertentangan.

- d. Hubungan kekuasaan bersifat intensional, bukan subjektif. Meskipun secara *de facto*, hubungan itu bisa dipahami, itu bukan karena hubungan tersebut merupakan efek suatu instansi pada yang lain, dalam konteks kausalitas, yang mungkin “menjelaskannya”, melainkan itu karena mereka, bagian demi bagian, dipengaruhi oleh suatu perhitungan; tidak ada kekuasaan yang berlaku tanpa sederet sasaran dan tujuan.
- e. Di mana pun ada kekuasaan, pasti ada perlawanan (*where there is power, there is resistance*). Titik-titik perlawanan itu tidak hanya berada di luar kekuasaan, tetapi juga bisa datang dari dalam kekuasaan itu sendiri. Berbagai resistensi yang masing-masing merupakan permasalahan khusus; perlawanan yang niscaya, spontan, liar, soliter, hasil persekongkolan laten, keras, tak kenal kompromi, mudah berkompromi, mengerjakan dengan pamrih, atau rela berkorban. Perlawanan-perlawanan itu merupakan sisi lain dari hubungan kekuasaan; tertangkap di dalamnya dan tidak tergoyahkan sebagai pelengkap dialektikanya. Jadi perlawanan-perlawanan itu didistribusikan di mana-mana, titik-titik, simpul-simpul, api perlawanan tersebar secara kurang atau lebih pada di dalam ruang dan waktu sehingga terkadang membangun kelompok atau individu secara definitif, menyalakan titik tertentu di badan, saat-saat tertentu dalam kehidupan, tipe-tipe tertentu tingkah laku.⁹³
- f. Wacana sebagai media kekuasaan beroperasi. Istilah wacana atau diskursus (*discourse*) berasal dari bahasa Latin, *discursus* yang berarti “lari kian kemari”.⁹⁴ Istilah ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *discourse* yang berarti *speech* (ucapan, pidato), *lecture* (ceramah, pengajaran), *sermon* (khutbah), *treatise* (risalah).⁹⁵ Definisi

⁹³ Foucault, *History*, 94-96.

⁹⁴ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 9.

⁹⁵ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford university Press, 1987), 245.

tersebut memiliki kemiripan dengan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang mendefinisikan diskursus atau wacana dengan kuliah, ucapan, percakapan.⁹⁶

Terkait dengan definisi wacana atau diskursus (*discourse*), Foucault menulis bahwa definisi diskursus yang paling umum adalah sekelompok penampilan-penampilan verbal (*a group of verbal performances*).⁹⁷ Dengan pengertian tersebut, maka diskursus merujuk kepada penggunaan linguistik (secara umum), tetapi tidak semua penggunaan linguistik adalah wacana. Ia tidak hanya merujuk kepada setiap aspek kebahasaan yang hadir dalam aktivitas komunikasi, seperti percakapan sehari-hari, namun juga merujuk pada percakapan yang serius yang dapat mempengaruhi orang yang di dalamnya kekuasaan beroperasi.⁹⁸

Secara spesifik, Foucault mendefinisikan wacana sebagai sesuatu yang diproduksi oleh kelompok tanda. Ia juga sebagai ketetapan formulasi, rangkaian kalimat atau proposisi. Wacana juga didefinisikan sebagai kumpulan pernyataan yang berhubungan erat dengan sistem formasi tunggal yang disebut dengan formasi diskursif. Berangkat dari definisi ini, Foucault kemudian mencontohkan wacana dengan berbagai bentuk misalnya wacana klinis, wacana psikiatris, wacana ekonomis, dan lain-lain.⁹⁹

Wacana—dalam kaitannya dengan kekuasaan, menyebar ke seluruh rangkaian hubungan dalam kehidupan sosial, mulai dari hal-hal yang formal maupun non-formal. Mulai dari level keluarga hingga ke level kehidupan bernegara. Wacana tersebut eksis dalam seluruh hubungan kehidupan sosial; orang tua-anak, murid-guru, pasien-dokter, dan seterusnya. Motivasi dan dampaknya terlihat dalam

⁹⁶ WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1144.

⁹⁷ Michael Foucault, *the Archeology of Knowledge*, (London: Routledge, 1989), 120.

⁹⁸ Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, *Beyond Structuralism and Hermeneutic* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), mendef 48.

⁹⁹ Michael Foucault, *Archaeology of...*, 121.

berbagai bentuk seperti; undang-undang, norma, interogasi, konsultasi, narasi autobiografi maupun surat-surat yang direkam, ditulis, dipasang dalam dokumen, dipublikasi, dan yang dikomentari oleh orang lain.¹⁰⁰

Dalam konteks relasi wacana dan kekuasaan, agama sebagai sebuah entitas dan institusi teologis spiritual sangat berperan dalam mengkonstruksi wacana. Melalui ajaran dan pesan yang disampaikan oleh para ulama dan agamawan sebagai pemegang otoritas, agama kemudian menjadi pengatur bagaimana pengikutnya menjalani berbagai hal dalam kehidupan baik yang bersifat fundamental hingga hal-hal yang dianggap remeh sejak dari bangun tidur sampai tidur kembali, seperti persoalan spiritual-moral, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Aspek pengaturan dan norma yang inheren dalam ajaran agama inilah yang menjadi unsur utama wacana keagamaan.¹⁰¹

Wacana keagamaan (*religious discourse*) didefinisikan sebagai diskursus yang memusatkan perhatiannya pada sumber atau doktrin-doktrin ajaran agama. Diskursus dengan segala bentuk klaim validitasnya, berupaya memproduksi representasi kebenaran dari nilai-nilai moral dan hukum yang terkandung di dalam doktrin agama guna mempengaruhi perilaku dan pengetahuan para pemeluknya. Diskursus keagamaan tidak hanya berkembang melalui disiplin-disiplin yang dikembangkan untuk menelaah dan mengkaji ajaran agama. Dalam kasus agama Islam, hal itu hadir dalam bentuk disiplin keilmuan seperti tafsir, kalam, fikih, tasawuf dan filsafat. Akan tetapi ia juga menyebar melalui institusi-institusi keagamaan semacam majelis ulama, lembaga pastoral, dan bentuk lainnya.¹⁰²

Berdasarkan definisi tersebut, wacana keagamaan dapat dipahami dan didefinisikan sebagai produk pemahaman para agamawan terhadap sumber ajaran agama. Dalam tradisi Islam, wacana keagamaan itu hadir dalam bentuk produk kitab tafsir, kitab hadis, kalam, tasawuf, fikih dan lainnya ataupun dalam bentuk

¹⁰⁰ Michael Foucault, *The History of...*, 66.

¹⁰¹ Ulya, *Hubungan Kekuasaan...*, 99..

¹⁰² Lihat Rudi Harisyah Alam, "Perspektif Pasca-Modernisme dalam Kajian Keagamaan" dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan (ed.), *Tradisi...*, 72.

institusi dan organisasi keagamaan formal seperti MUI, NU, Muhammadiyah, PERSIS dan yang semisalnya.¹⁰³

Wacana yang inheren di dalamnya adalah norma atau undang-undang, pernyataan-pernyataan ilmiah, pengetahuan dan fatwa keagamaan dan lain-lain yang dihasilkan dari setiap rangkaian hubungan dalam aktivitas sosial akan mengatur cara berpikir, bersikap, berbicara, mendefinisikan sesuatu, berperilaku dan seterusnya. Pada kondisi inilah terbukti bahwa dalam wacana terkandung kekuasaan. Dalam istilah lain, Foucault menyebut wacana sebagai instrumen kekuasaan sekaligus sebagai efek kekuasaan.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kekuasaan (*power*) lebih cenderung pada subjektivikasi dari pada objektivikasi di mana kekuasaan menjelma sebagai strategi yang bersifat kompleks dalam sebuah masyarakat dengan perlengkapan, teknik, dan mekanisme tertentu. Dengan kata lain, ia lebih cenderung sebagai alat kekuasaan dari pada alat kebebasan individu. Itulah sebabnya strategi kekuasaan itu menggunakan aturan, norma, disiplin, dan pengawasan untuk memperoleh kepatuhan.

Pada kajian disertasi ini, makna kuasa (*power*) dengan merujuk kepada teori Foucault mencakup beberapa unsur, yakni; negara, rezim gender, ortodoksi Sunni, ortodoksi heteroseksual.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis, Metode Penelitian dan Pendekatan

Jenis riset ini merupakan penelitian kualitatif, dalam bentuk kajian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan penelitian lapangan yakni *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama RI dengan mewawancarai pihak-pihak dan penulis yang terlibat dalam penyusunannya, terutama pada topik yang berkaitan dengan tema seksualitas dan gender. Noeng Muhajir menjelaskan studi bahwa pustaka paling tidak dapat diklasifikasikan atas studi pustaka yang memerlukan olahan filosofis dan teoritis dari

¹⁰³ Ulya, *Hubungan Kekuasaan...*, 100.

¹⁰⁴ Michael Foucault, *Archaeology of...*, 133-134, *The History of...*, 101.

pada uji empiris di lapangan, serta studi pustaka yang memerlukan olahan uji kebermaknaan empirik di lapangan.

Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah deskriptif analitik interpretatif,¹⁰⁵ yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan utama menguraikan dan menganalisis pemikiran, teori, pandangan, verifikasi, eksplanasi tentang fenomena dan data secara filosofis dan teoretis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender dengan menggunakan teori maskulinitas dan relasi kuasa.

2. Sumber Data

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data tertulis/dokumentasi yaitu *TTKA* sebanyak sembilan seri/volume dan *TIKA* sebanyak tiga volume/seri.

Sedangkan sumber data lapangan adalah data lapangan berupa data wawancara dan dokumentasi dengan para pihak yang terlibat dalam penyusunan tafsir, khususnya pihak Lajnah Pentashihan Mushaf *al-Qur'an* (LPMQ) Kementerian Agama RI. Data sekunder/pendukung lainnya adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan Kementerian Agama RI yaitu berupa *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim* (jilid 1 dan 2) tahun 2015, *Tafsir Tahlili* (30 juz)—baik edisi tahun 1975 maupun edisi revisi tahun 2010. Di samping itu, sumber lapangan (*field reseach*) juga diperlukan sebagai verifikasi dan eksplorasi data yakni melalui wawancara secara langsung (*luring/offline*) dan daring (*online*) terhadap tim yang terlibat dalam penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama khususnya yang terkait dengan wacana seksualitas.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam tulisan ini menggunakan dua teori yaitu teori relasi kuasa—pengetahuan Michael Foucault dan teori maskulinitas hegemonik (*hegemonic masculinity*) yang telah

¹⁰⁵ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 1995), 103.

dikembangkan oleh penulis dengan istilah baru yaitu *passive masculinity* (maskulinitas pasif) dan *active masculinity* (maskulinitas aktif). Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis hasil penelitian mulai dari bab II, III, dan bab IV. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode induktif yaitu memulai dari hal-hal yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum sehingga menghasilkan sebuah temuan baru (*novelty*) yang menjadi pengetahuan dan teori baru. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, analisis dinamika dan pergeseran politik seksualitas di Indonesia yang difokuskan pada era pasca Orde Baru, dengan menggunakan teori relasi kuasa. Analisis pada bagian ini untuk melihat baik secara sinkronik maupun diakronik hubungan antara politik dan kebijakan negara dalam seksualitas sehubungan dengan konteks penyusunan *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama.
- b. Tahap kedua, analisis relasi kuasa dalam penyusunan *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* khususnya dalam wacana seksualitas. Fokus analisis pada bagian ini terkait dengan proses seleksi mufasir serta alur penulisan tafsir sampai pada tahap penerbitan. Analisis pada bagian ini untuk melihat konstruksi relasi kuasa baik pada proses pemilihan tim penulis, tema penulisan maupun proses penulisan tafsir dalam kaitannya dengan konstruksi maskulinitas dalam wacana seksualitas pada *TTKA* dan *TIKA*.
- c. Tahap ketiga, analisis relasi kuasa dan konstruksi maskulinitas dalam wacana seksualitas yang hadir pada *TTKA* dan *TIKA*. Pada tahap ini, penulis membongkar relasi kekuasaan dan konstruksi maskulin yang hadir dalam topik-topik seksualitas pada *TTKA* dan *TIKA*. Pada tahap ini, penulis menghubungkan politik seksualitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan konstruksi maskulinitas dalam *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama.

H. Sistematika Pembahasan

Metode atau sistematika pembahasan dalam disertasi ini menggunakan model piramida terbalik (dari umum ke khusus), di mana penulis menjelaskan secara sistematis persoalan dari hal yang bersifat umum, lalu mengerucut kepada pokok persoalan terkait wacana seksualitas dan maskulinitas dalam *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama. Adapun sistematika pembahasan secara detail sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, yang mengandung latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa riset ini mengandung problematika akademik yang memerlukan penelitian mendalam beserta rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian. Pada bab ini juga diuraikan tujuan dan signifikansi penelitian, telaah pustaka (*literature review*) yang berisi uraian berbagai penelitian terkait, kerangka teoritis yang berisi penjelasan teoritis yang digunakan dalam penelitian sekaligus cara menggunakan teori tersebut dalam penelitian, jenis penelitian, pengumpulan data dan metode penelitian agar penelitian sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah.

Bab II, menjelaskan tentang dinamika politik seksualitas di Indonesia khususnya pasca Orde Baru dengan menggunakan perspektif relasi kuasa–pengetahuan. Pada bab ini dijelaskan bentuk dan dinamika politik seksual dan konstruksi maskulinitas dalam bentuk otoritas negara dalam mendisiplinkan dan menormalisasi seksualitas warga negara baik dalam bentuk institusi, kebijakan seperti program KB, Undang-undang Perkawinan, dan lain sebagainya.

Bab III mengelaborasi aneka produk mushaf al-Qur'an dan tafsir yang dihasilkan oleh Kementerian Agama sejak era Orde Baru hingga Orde Reformasi beserta relasi kuasa yang hadir dalam proses penulisannya baik dalam proses penulisan Mushaf al-Qur'an Standar, terjemah al-Qur'an, Ulumul Qur'an maupun berbagai varian tafsir, baik *tahlili* (kronologis), tafsir al-*wajiz* (tafsir ringkas), tafsir *maudū'i* (tafsir tematik) dan tafsir tematik ilmi. Fokus bab ini mengungkap aspek relasi kuasa dalam penyusunan *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama, khususnya untuk mengungkap

terbentuknya tim penulis tafsir yang sejalan dengan ideologi gender Kementerian Agama.

Bab IV mengungkap konstruksi maskulinitas dan relasi kuasa pengetahuan dalam wacana seksualitas *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama. Bagian ini juga mengungkap relasi kuasa-pengetahuan yang beroperasi dalam wacana pengetahuan seksualitas dalam *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari penelitian ini terutama jawaban terkait dengan problem penelitian.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam beberapa bab dalam laporan penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal pokok, sebagaimana berikut:

Politik seksualitas yang dijalankan oleh kekuasaan negara di Indonesia pada rezim Orde Baru sangat menonjolkan dominasi maskulinitas laki-laki dengan mendomestifikasi peran perempuan dengan dua karaktersitik, pertama otoritarianisme, kedua, dominasi patriarkis melalui politik “ibuisme negara” (*state ibuism*) yang cenderung melakukan domestifikasi perempuan serta kontrol yang kuat terhadap seksualitas. Politik ini mengalami dinamika dan pergeseran (*change*) pada Orde Reformasi, meskipun masih dapat ditemukan jejak patriarkis.

Pada Orde Reformasi politik seksualitas mengalami dinamika dan pergeseran ke arah yang lebih ramah gender dan perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak seksual bagi perempuan sehingga lebih setara baik melalui kebijakan undang-undang seperti revisi UU Perkawinan, Pembentukan Komnas Perempuan dan Anak, penerbitan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Pornografi dan lain sebagainya. Perubahan dan pergeseran tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti perubahan rezim otoriter menuju rezim demokratis, tetapi juga oleh faktor eksternal antara lain efek penyuaan Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi serta gerakan feminisme dan gender melalui NGOs.

Adanya pergeseran politik seksual pada masa Orde Reformasi yang lebih ramah gender secara institusional berpengaruh terhadap institusi Kementerian Agama, namun tidak berdampak signifikan terhadap proses penyusunan *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya pada proses seleksi dan penentuan tim *mufassir* pada seri/tema yang berkaitan dengan seksualitas dan gender. Hal ini dapat dibuktikan dengan dua

hal; pertama, komposisi kuantitatif penulis tafsir laki-laki (*mufasssir*) laki-laki yang mencapai rata-rata 90 persen pada tiap topik, sedangkan penulis perempuan (*mufasssirah*) hanya rata-rata sepuluh persen dalam tiap tema/seri tafsir.

Terbentuknya dominasi dan hegemoni maskulinitas dalam tim tafsir tersebut juga dilatarbelakangi oleh adanya relasi kuasa berupa jaringan para penulis tafsir yang terafiliasi kepada empat institusi/Lembaga yaitu Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, jaringan Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta, serta jaringan Ikatan Alumni al-Azhar, Kairo Mesir. Sedangkan sisa lainnya terafiliasi kepada Lembaga LIPI, UIN/IAIN, MUI, NU, Muhammadiyah dan PERSIS.

Dalam kaitannya dengan kajian gender dan kitab suci (al-Qur'an dan tafsir), disertasi ini memberikan sumbangan penting secara teoritik terhadap kajian seksualitas dan gender setidaknya dalam dua hal. *Pertama*, memperkenalkan atau mempopulerkan penggunaan teori maskulinitas dalam kajian teks kitab suci agama-agama, khususnya dalam kajian al-Qur'an dan tafsir yang masih belum banyak dielaborasi secara serius khususnya pada kajian disertasi. *Kedua*, memberikan sumbangan teoritik baru terkait kajian maskulinitas, yaitu memperkenalkan konsep maskulinitas hegemonik patriarkis (*patriarchic hegemonic masculinity*) dengan tiga varian atau kategori dalam membaca produk tafsir al-Qur'an yaitu maskulinitas hegemonik aktif, maskulinitas hegemonik pasif dan maskulinitas hegemonik setara. Sebagai temuan penting (*novelty*), sumbangan teoritik tersebut merupakan elaborasi atau pengembangan dari teori maskulinitas hegemonik yang dipopulerkan oleh R.W. Connell yang menyebut bahwa maskulinitas bukanlah objek yang koheren yang selalu dapat menghasilkan ilmu yang bersifat general.

Konseptualisasi *hegemonic masculinity* membuka ruang terbentuknya tidak hanya memproduksi relasi gender yang hierarkis, namun juga kemungkinan relasi gender yang lebih setara dan demokratis, yang menghapus perbedaan kuasa. Dalam pengertian ini, menurut Connell, sangatlah mungkin membuat sebuah definisi maskulinitas hegemonik yang bersifat positif, bukan yang patriarkis

(negatif). Dengan demikian, pengembangan teori tersebut seperti yang menjadi temuan utama dalam disertasi selaras dengan konsep awal yang diperkenalkan oleh R.W. Connell.

Teori *hegemonic masculinity* diistilahkan dengan maskulinitas hegemonik patriarkis (*patriarchal hegemonic masculinity*), yaitu sebuah bentuk maskulinitas hegemonik yang menonjolkan sisi laki-laki sebagai pihak yang secara hierarkis lebih unggul dan hebat dari pada perempuan. Dalam konteks wacana seksualitas pada *TTKA* dan *TIKA*, model *patriarchal hegemonic masculinity* dapat dikategorikan menjadi tiga model. Pertama, disebut maskulinitas patriarkis aktif (*active patriarchal masculinity*) dalam konteks *TTKA* dan *TIKA* ketika representasi maskulinitas hadir secara dominan dalam wacana tafsir tersebut dengan menonjolkan aspek patriarkis secara eksplisit. Pada saat yang sama, aspek femininitas tidak muncul atau hanya hadir dalam porsi wacana yang minim dan secara hierarkis berada dalam hegemonik patriarkis. Kategori ini dapat ditemukan dalam wacana nikah *misyār*, kepemimpinan perempuan di ranah publik, hak memilih pasangan, hubungan seksual suami istri, orientasi seksual, kekerasan seksual, serta wacana transeksual/trangender.

Kategori kedua, disebut maskulinitas patriarkis pasif (*passive patriarchal masculinity*) adalah ketika representasi femininitas disebut atau diuraikan secara luas, sementara maskulinitas hegemonik tidak hadir atau hanya muncul dalam proporsi yang sangat minim dalam wacana *TTKA* dan *TIKA*, akan tetapi kehadiran femininitas tersebut justru hanya menguraikan sisi inferioritas perempuan yang secara implisit justru tetap meneguhkan maskulinitas hegemonik yang patriarkis. Kategori ini direpresentasikan dalam wacana seksualitas dan reproduksi seperti; kehamilan, dan kelahiran, penyusuan anak, aurat, busana dan pornografi, dan aborsi.

Kategori ketiga, diistilahkan dengan maskulinitas patriarkis yang setara (*equal patriarchal masculinity*) adalah ketika representasi maskulinitas dan femininitas hadir dalam proporsi yang seimbang dalam wacana *TTKA* dan *TIKA*, sehingga hubungannya bersifat berkesetaraan (*equality*), namun perspektif kesetaraan itu tetap dalam perspektif logika dan cara pandang dunia patriarkis *TTKA* dan *TIKA*.

Kategori ini dapat dilihat pada diskursus keluarga berencana serta pernikahan-pernikahan bermasalah (nikah *mut'ah*, nikah sirri/'*urfi*, pernikahan paksa, pernikahan di bawah umur), serta wacana pemerkosaan, perzinahan dan prostitusi. Ketiga varian atau kategori maskulinitas hegemonik (aktif, pasif, dan setara) diistilahkan dengan *mild patriarchic masculinity* (maskulinitas patriarkis lembut). Disebut demikian karena pada saat dua kategori yang bersifat pasif dan aktif masih menonjolkan maskulinitas yang hierarkis-patriarkis, namun pada satu kategori yakni maskulinitas hegemonis setara menampilkan wajah yang berkesetaraan gender meskipun dalam bingkai cara pandang maskulinitas yang patriarkis. Dua kategori di atas (aktif dan pasif) melahirkan sub varian/kategori yaitu *strong hegemonic masculinity* dan *mild hegemonic masculinity*.

Temuan penting terkait konstruksi maskulinitas hegemonik dalam disertasi ini sekaligus meng-*counter* riset sebelumnya dalam disertasi Tinggal Purwanto yang menyatakan bahwa *Tafsir al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI sebagai tafsir berkesetaraan gender tidaklah seutuhnya benar. Fakta dalam disertasi ini yang memotret lebih luas dan komprehensif terkait wacana seksualitas dan gender justru menunjukkan fakta sebaliknya terkait maskulinitas hegemonik yang masih patriarkis baik dalam komposisi penulis tafsir maupun representasi dalam wacana tafsir.

Pada saat yang sama, temuan ini juga memperkokoh temuan Mochammad Nur Ichwan terkait relasi negara, kitab suci dan politik dalam terjemah al-Qur'an Kementerian Agama yang menyebut bahwa produk al-Qur'an dan terjemahnya tidak terlepas dari relasi kuasa dan ideologi negara yang masih bersifat bias dan sektarian. Temuan ini juga relevan dengan tulisan Akhmad Supriadi, Moch. Nur Ichwan dan Syihabuddin Qalyubi dalam artikel mereka terkait perubahan terjemahan kata *al-zawj* dalam tiga edisi QDT Kementerian Agama (1969, 1990, 2002) yang menemukan bahwa sesungguhnya meskipun sudah terdapat beberapa perubahan terjemahan yang seakan lebih ramah gender, namun secara umum, perspektif gender dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya* versi Kementerian Agama masih sangat menonjolkan maskulinitas dan patriarkis.

Selain itu, disertasi ini juga membuktikan bahwa relasi kuasa yang bekerja dalam tim *Tafsir al-Qur'an Tematik* serta *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama tidaklah bersifat tunggal namun dalam bentuk yang beragam, antara lain dalam bentuk kuasa ortodoksi Sunni, kuasa heteronormativitas, kuasa kebijakan negara, serta kuasa dominasi maskulinitas laki-laki yang secara intelektual tidak memiliki perspektif dan sensitivitas gender, dengan meminggirkan penulis yang memiliki perspektif gender. Mayoritas tim penulis (*mufasssir/mufasssirah*) terhubung dalam jaringan intelektual yang terafiliasi pada empat jaringan intelektual dan Lembaga, yaitu PTIQ, IIQ, PSQ serta jaringan alumni Universitas al-Azhar, Kairo (*al-azhāriyyūn*). Kuasa rezim gender dan jaringan intelektual tersebut kemudian bekerja dalam wacana tafsir untuk melanggengkan ortodoksi ideologi tertentu baik ortodoksi Sunni (dalam pernikahan), ortodoksi maskulinitas hegemonik serta ortodoksi heteronormativitas.

B. SARAN-SARAN

Penelitian ini merupakan penelitian multidisipliner yang memadukan antara dua teori sosial yaitu teori gender (maskulinitas) dan teori relasi kuasa yang diaplikasikan pada studi Islam, yakni wacana seksualitas pada *Tafsir al-Qur'an Tematik* dan *Tafsir Ilmi* Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini menghasilkan hal yang kritis-dekonstruktif dengan terkuaknya politik seksualitas dalam bentuk relasi kekuasaan-pengetahuan yang melekat pada wacana tersebut. Proses dan hasil temuan dalam riset ini diharapkan mampu memperkaya model studi Islam, khususnya kajian al-Qur'an, Tafsir dan Hadis yang berspektif interdisipliner dan kritis (*participant as observer*) dengan menggunakan teori maskulinitas, yang belum banyak digunakan dalam studi Islam dan gender di Indonesia.

Penelitian ini telah dilakukan secara maksimal, namun pada akhirnya karena keterbatasan wawasan dan akses terhadap sumber penelitian masih menyisakan berbagai kekurangan dan ruang untuk diteruskan oleh para peneliti selanjutnya. Penggunaan teori dalam riset ini boleh jadi masih pada lapisan kulit luar, belum menyentuh esensi dan filosofi teori yang paling mendalam. Selain itu, dari aspek obyek

penelitian hanya memfokuskan pada aspek wacana seksualitas, belum menyentuh topik dan tema lain dalam produk Tafsir Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, studi ini bukanlah produk yang final, tetapi masih membuka ruang untuk dilanjutkan dengan teori dan perspektif metodologi yang berbeda untuk ditemukan hal yang berbeda baik berupa antitesis, sintesis maupun tesis yang lebih baru dan orisinal.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Tafsir al-Qur'an Sebuah Pengantar*, diterj. M. Nur Prabowo S. 'Ilm al-Tafsir. Yogyakarta, Baitul Hikmah Press: 2016.
- Ali, Kecia. *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith and Jurisprudence*. Oxford, Oneworld: 2006.
- Alimi, Moh. Yasir. *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama*. Yogyakarta, LKiS: 2004.
- Anwar, Etin. *Gender and Self in Islam*. London and New York: Routledge: 2006
- Anwar, Etin. *Feminisme Islam, Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia*, diterjemahkan oleh Nina Nurmila dari edisi asli *A Genealogy of Islamic Feminism: Pattern and Change in Indonesia*. Bandung: Mizan, 2021.
- Anwar, Etin. *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Kurniasih dari edisi asli *Gender and Self in Islam*. Bandung: Mizan: 2017.
- Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XI*. Jakarta, BPS Pusat: 1998.
- Bagus, L. *Kamus Filsafat*. Jakarta, Gramedia: 2002.
- Baidowi, Ahmad. *Memandang Perempuan: Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*. Bandung, Marja: 2011.
- Bauer, Karen. *Gender Hierarchy in the Qur'an: Medieval Interpretations, Modern Responses*. New York, Cambridge University Press: 2015.

- Bennet, Linda Rae (ed.). *Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia: Sexual Politics, Health, Diversity and Representations*. New York, Routledge: 2015.
- Bennet, Linda Rae dan Sharyn Graham Davies. *Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia: Sexual Politics, Health, Diversity and Representations*. London and New York, Routledge: 2015.
- Bennet, Linda Rae dan Sharyn Graham Davies. *Sexualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman dan Representasi*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2018.
- Blackburn, Susan. *Women and State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press: 2005.
- Bouhdiba, Abdelwahab. *Sexuality in Islam*. London and New York, Routledge: 2008.
- Bucaille, Maurice. *The Bible, The Qur'an and Science*. New Delhi, Adam Publisher & Distributor: 2007.
- Campanini, Massimo. "Qur'an and Science: A Hermeneutical Approach". *Journal of Qur'anic Studies*, Vol.7. No.1: 2005.
- Candraningrum, Dewi. *Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*. IRASEC: 2013.
- Connell, R.W. *Masculinities: Second Edition*. Berkeley Los Angeles, University of California Press: 2005.
- De Sony, Amanullah. *The Crisis of Islamic Masculinities*. London – New York, Bloomsbury Publishing: 2015.
- De Sony, Amanullah. *The Crisis of Islamic Masculinities*. London and New York, Bloomsbury Publishing: 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf: 1990.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*. Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf: 1990.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terdjemahnya Djuz 1 – 10*. Djakarta, Pertjetakan dan Offset Jamunu: 1965.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terdjemahnya Djuz 11 – 20*. Djakarta, Pertjetakan dan Offset Jamunu: 1965.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terdjemahnya Djuz 21 – 30*. Djakarta, Pertjetakan dan Offset Jamunu: 1965.
- Departemen Agama RI. *Juz 'Ammah dan Terjemahannya*. Jakarta, PT Perca: 1978.
- Departemen Agama RI. *Mukadimah Al-Qur'ān dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Lembaga Pencetakan al-Qur'an Departemen Agama: 2009.
- Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhu'afa*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2008.
- Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2008.
- Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta, Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2008.
- Dewan Penyelenggara Penafsir al-Quran. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid I*. Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Quran: 1975.

- Diponegoro, Ahmad Muhammad. "Tafsir Ilmi Kisah Adam dan Musa dalam Surat al-Baqarah: Studi Terhadap al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama". *Disertasi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2013.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta, Gramedia: 1992.
- Edward, Paul (ed.). *The Encyclopedia of Philosophy, II*, New York, Mc Millan Publishing: 1972.
- El Fadl, Khaled M. *About Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford, Oneword Publication: 2001.
- Feener, R. Michael. "Notes Toward the History of Qur'anic Exegesis in Southeast Asia". *Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. V, No. 3: 1998.
- Fikry, Arif Rijalul. "Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI (Kajian Epistemologi Tafsir Ayat-Ayat Kelautan)". *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017.
- Foucault, Michael. *The Use of Pleasure: Volume 2 of the History of Sexuality* (New York: Vintage Books, 1990)
- Foucault, Michael. *Discipline and Punish: The Birth of Prison*, trans. Alan Sheridan. England, Penguin Books: 1997.
- Foucault, Michael. *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, trans. Robert Hurley. New York, Phanteons Book: 1978.
- Foucault, Michael. *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, trans. Robert Hurley. New York, Vintage Book: 1990.
- Gusmian, Islah. "Dialektika Tafsir al-Qur'an dan Praktik Politik Rezim Orde Baru". *Disertasi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014.

- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta, LKiS: 2013.
- Hadiz, Liza (ed.) *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Yogyakarta, Pustaka LP3ES: 2004.
- Haryatmoko. “Kekuasaan Melahirkan Anti Kekerasan”. *Jurnal Basis* 51, No. 01-02, Januari-Februari: 2002.
- Hefner, Robert W. (ed.). *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*. New York, Routldge: 2018.
- Helie, Anissa (ed.). *Sexuality in Muslim Contexts Restrictions and Resistance*. London – New York, Zed Books: 2012.
- Helie, Anissa, and Homa Hoodfar (ed.). *Sexuality in Muslim Context Restriction and Resistance*. London and New York, Zed Books Ltd: 2012.
- Heumann, Silke. “Gender, Sexuality and Politics; Rethinking the Relationship Between Feminism and Sandinista in Nikaragua”. *Social Politics*, Vol. 21 Number 2: 2014.
- Hull, Terence H. dan Valerie J. Hull. *Means, Motives and Menses: Use of Herbal Emmenagogues in Indonesia*. Etienne van de Walle dan Elisha P. Renne (ed.) Chicago dan London, The University of Chicago Press: 2001.
- Ichwan, Moch. Nur. “Negara Kitab Suci dan Politik: Terjemah Resmi al-Qur’an di Indonesia” dalam Henri Chambert-Loir (penyunting) *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia:2009.
- Moch. Nur Ichwan “ Official Reform of Islam: State Islam and The Ministry of Religious Affairs 1966-2004”, *Disertasi*, Tillburg University: 2006.
- Ilyas, Yunahar. *Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an: Studi Pemikiran Para Mufassir*. Yogyakarta, Itqan Publishing: 2015.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Johns, Anthony H. *Quranic Exegesis in the Malay: an Introductory Survey*. Abdullah Saeed (ed.) *Approaches to the Qur'an in the Contemporary Indonesia*. New York, Oxford University: 2005.

Kadir, Faqihuddin Abdul dan Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta, Komnas Perempuan: 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/maskulinitas> (Kamus Versi online/daring), online 12 Maret 2020.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta, Kementerian Agama RI: 2011.

Kementerian Agama RI. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI: 2007.

Kementerian Agama RI. *Makkīy dan Madanīy: Periodisasi Pewahyuan Al-Qur'an*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran: 2017.

Kementerian Agama RI. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Balitbang dan Diklat Kemenag RI: 2016.

Kementerian Agama RI. *Pedoman Bantuan Sosial Kelompok Keluarga Prasinah*. Jakarta, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI: 2011.

Kementerian Agama RI. *Pedoman Bantuan Sosial Kelompok Keluarga Sakinah*. Jakarta, Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI: 2011.

- Kementerian Agama RI. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra - Nikah*. Jakarta, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI: 2011.
- Kementerian Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah*. Jakarta, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI: 2011.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir al-Qur'an Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta, Kementerian Agama RI: 2012.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Kebinekaan*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2011.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Kenegaraan*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2011.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Amar Ma'ruf Nahi*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2013.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2009.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2010.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Jihad, Makna dan Implementasinya*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2011.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2012.

- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur'an*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2012.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Keniscayaan Hari Akhir*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2010.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kerja dan Ketenagakerjaan*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2010.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2009.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Komunikasi dan Informasi*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2011.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Maqashidusy Sya'riah: Memelihara Tujuan Utama Syariat*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2013.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta, Kementerian Agama RI: 2011.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2012.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2009.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2012.

- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Generasi Muda*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2011.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pendidikan, Pembangunan Karakter dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2010.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Sinergitas Internal Umat*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2013.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Spiritualitas dan Akhlak*. Jakarta, Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2010.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI: 2012.
- Kementerian Agama RI *Tafsir Ilmi: Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI: 2016.
- Kementerian Agama RI *Tafsir Ringkas Jilid 1*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran: 2015.
- Kementerian Agama RI *Tafsir Ringkas Jilid 2*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran: 2015.
- Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta, Kemenag RI: 2011.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 495 tahun 1995 tentang Pengurus Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat masa bakti tahun 1995 - 1998 .

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 495 tahun 1995 tentang Pengurus Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat masa bakti tahun 1995 - 1998 .

Kugle, Scott Siraj al-Haqq. *Homosexuality in Islam Critical Reflection on Gay, Lesbian and Transgender Muslim*. Oxford, England, Oneworld Publication: 2011

Kusumaningtyas. AD. Dkk. *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-agama*. Jakarta, Elex Media Komputindo: 2015.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. *Asbābun Nuzūl: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur'an*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran: 2017.

Lindsey, Linda L. *Gender Roles: A Sociological Perspective*. New Jersey, Prentice Hall: 1990.

Martin, Hale dan Stephen E. Finn. *Masculinity and Femininity in the MMPI-2 and MMPI-A*. Minneapolis – London, University of Minnesota Press: 2010.

Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosda :1995.

Molineaux, John W. dan Paul J. Gertler. The Impact of Targetted Family Planning Program in Indonesia. *Jurnal Population and Development Review*, Vol. 26, Supplement: Population and Economic Change in East Asia,

Muhammad, Husein (Dkk). *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*. Jakarta, PKBI: 2011.

Mukernas Ulama al-Qur'an hasilkan Tujuh Rekomendasi” <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/315-mukernas-ulama-al-qur-an-2018-menghasilkan-7-rekomendasi>, online tanggal 24 Agustus 2019.

Musallam, B.F. *Sex and Society in Islam*. New York, Cambridge University Press: 1983.

- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta, LkiS: 2012.
- Nasution, Harun (ed.). *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*. Ensiklopedia Islam cet. ke-1, jilid 1, Jakarta, Depag RI:1993.
- Nasution, Khoiruddin dan Syamruddin Nasution. Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1: 2017.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2008.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Court*. Amsterdam, Amsterdam University Press: 2010.
- Pedersfield, Howard M. *Kajian Al-Quran di Indonesia*, terj. Dari judul asli *Popular Indonesian Literature of the Quran*. Bandung: Mizan, 1996.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemberian Cuti Kepada Pegawai Negeri Sipil, dalam <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2018/01/peraturan-bkn-nomor-24-tahun-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf>.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) .

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan...*,22-23.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* serta Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan ANAK.
- Pilcher, Jane, dan Ilmelda Whelehan. *50 Key Concepts in Gender Studies*. London, SAGE Publications Ltd: 2004.
- Pink, Johanna. “Tradition, Authority, and Innovation in Contemporary Sunni Tafsir: Towards a Typology of Qur’an Commentaries from The Arab World, Indonesia and Turkey” dalam *Journal of Qur’anic Studies*, Vol. 12 (2010)
- Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim di Indonesia*. Yogyakarta, Suara Muhammadiyah: 2019.
- Robinson, Kathryn. *Masculinity, Sexuality, and Islam: The Gender Politics of Regime Change in Indonesia*.
- Robinson, Kathryn. *Maskulinitas, Seksualitas dan Islam: Politik Gender Perubahan Rezim di Indonesia*. Linda Rae Bennett (ed.) *Seksualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman, dan Representasi*. Diterj. Nina Nurmila (dkk.) Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2018.
- Robinson, Kathryn. *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. New York, Routledge: 2009.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*. Yogyakarta, Larassukma – Penerbit Lampu Merapi: 2019.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*. Yogyakarta, Diandra Pustaka Indonesia: 2014.

- Sejarah Pembentukan Kementerian Agama” dalam *Profil Kementerian Agama RI*, 2-3.
- Shohib, Muhammad. *Profil Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kemenag RI: 2013.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta, LkiS: 1999.
- Suharnadji. *Arkeologi Pengetahuan Michael Foucault; Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Bagong Suyanto (ed.) Yogyakarta, Aditya Media: 2010.
- Supriadi, Akhmad. dkk. “Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis? Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan Perempuan dan Pasangan Surgawi” dalam *Suhuf: Jurnal Pengkajian al-Qr'an dan Budaya*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2009
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2007.
- Suryakusuma, Julia I. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Jakarta, Komunitas Bambu: 2011.
- Suryakusuma, Julia I. *Seksualitas dalam Pengaturan Negara*. Liza Hadiz (ed.) *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Yogyakarta, Pustaka LP3ES: 2004.
- Thong, Rosemarie Putnam *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta, Jalasutra: 2010.
- Thong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Charlotte, University of North Carolina: 2009.

- Tim Penyusun. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta, Kementerian Agama RI: 2010.
- Tim Penyusun. *Tafsir al-Quran Tematik: al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer I*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: 2012.
- Tim Penyusun. *Tafsir al-Quran Tematik: al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: 2012.
- Tim Penyusun. *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*. Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: 2012.
- Tim Penyusun. *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta, Kementerian Agama RI: 2008.
- Tim Penyusun. *Tafsir Tematik: Penciptaan Manusia*. Jakarta, Kementerian Agama RI: 2010.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008.
- Tim Penyusun. *Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta, Kementerian Agama RI: 2008.
- Ulum, Khozainul. *Fatwa-Fatwa MUI dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Akademika Vol. 08 No. 2, Desember: 2014.
- Ulya. *Hubungan Kekuasaan–Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr QS an-Nisa [4]:59 pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955 1966*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2016.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta, Paramadina: 1999.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera* dan Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undang-gundang-nomor-1-tahun-1974> . lihat <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. New York, Oxford University Press: 1999.

Warwick, Donald P. *The Family Planning Program: Government Influence and Client Choice*. Population and Development Review, Population Council Vol. 12 No. 3, September: 1986.

Weeks, Jeffrey. *Sexuality (second edition)*. London and New York, Routledge: 2003.

“Gubernur Koster inta kepala daerah di Bali stop Kampanye KB dua anak cukup” dalam *Detiknews*, Kamis 27 Juli 2019 dalam <https://news.detik.com/berita/d-4603088/gubernur-koster-minta-kepala-daerah-di-bali-setop-kampanye-kb-2-anak-cukup>.

“Profil Komnas Perempuan” dalam
<https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, tanggal 29 November 2019.

